

# LAPORAN KINERJA

*Badan Pusat Statistik Kota Palembang*



2020



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PALEMBANG**

# **LAPORAN KINERJA**

*Badan Pusat Statistik Kota Palembang*



**2020**



## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Diukur atas

dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan maupun kegagalan merupakan tanggung jawab seluruh komponen BPS Kota Palembang.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran BPS Kota Palembang dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan BPS Kota Palembang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Palembang, 28 Februari 2021  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PALEMBANG

TAUFIQ HIDAYAT NR



## D A F T A R I S I

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iii
	Daftar Gambar	iv
	Daftar Lampiran	v
	Ringkasan Eksekutif	vi
Bab I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	3
	1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
	1.4 Sumber Daya Manusia	8
	1.5 Potensi dan Permasalahan	10
	1.6 Sistematika Penyajian Laporan	11
Bab II	Perencanaan Kinerja	
	2.1 Reviu Rencana Strategis BPS Kota Palembang 2020-2024	13
	2.2 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2020	20
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
	3.1 Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2020	22
	3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2015 - 2020	40
	3.3 Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020 - 2024	44
	3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan	47
	3.5 Prestasi BPS Kota Palembang Tahun 2020	48
	3.6 Kegiatan Prioritas BPS Kota Palembang 2020	51
	3.7 Upaya Efisiensi di BPS Kota Palembang	64
	3.8 Kinerja Anggaran Tahun 2020	69
Bab IV	Penutup	
	4.1 Tinjauan Umum	77
	4.2 Tindak lanjut	78
	Lampiran-lampiran	
	1 Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024	
	2 Perjanjian Kinerja 2020	
	3 Pengukuran Capaian Kinerja 2020	
	4 SDM BPS Kota Palembang	
	5 Kegiatan BPS Kota Palembang	
	6 Response Rate Survei 2020	
	7 Judul Publikasi	

## DAFTAR TABEL

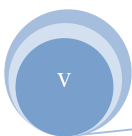
Tabel 1	: Capaian Kinerja , Penyerapan Anggaran dan Efisiensi BPS Kota Palembang Tahun 2020	vii
Tabel 2	: Kecamatan di Kota Palembang	7
Tabel 3	Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang	9
Tabel 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 5	Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia 2020	10
Tabel 6	: Reviu Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2020	21
Tabel 7	: Hasil Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2020	23
Tabel 8	: Jumlah Pengunjung Website BPS Kota Palembang	26
Tabel 9	: Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kota Palembang Tahun 2020	28
Tabel 10	: Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Tahun 2020	32
Tabel 11	: Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Tahun 2020	34
Tabel 12	: Capaian Kinerja Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat Tahun 2015 -2020	41
Tabel 13	: Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS selama tahun 2015 – 2020	42
Tabel 14	: Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Rencana Strategis 2020-2024	44
Tabel 15	: Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Kelompok Umur Hasil Penduduk 2020	54
Tabel 16	: Hasil Pendataan Hasil Updating Podes 2020 Kota Palembang	58
Tabel 17	: Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	65
Tabel 18	: Efisiensi per Unit Kerja BPS Kota Palembang Tahun 2020	66
Tabel 19	Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019	68
Tabel 20	: Penyerapan Anggaran dan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Dirinci Menurut Program	69
Tabel 21	: Penyerapan Anggaran dan Capaian Kinerja Per unit Kerja BPS Kota Palembang Tahun 2020	70
Tabel 22	: Penyerapan Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2020 Berdasarkan Tujuan dan sasaran	70
Tabel 23	: Konsistensi rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran Tahun 2020 dan 2019	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan	8
Gambar 2	: Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2020	20
Gambar 3	: Persentase Konsumen di PST BPS Kota Palembang yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	25
Gambar 4	: Pengunjung Website BPS Kota Palembang Tahun 2020	26
Gambar 5	: Publikasi BPS Kota Palembang yang menerapkan standar akurasi	27
Gambar 6	: Survei Kepuasan Pelanggan PDAM Tirta Musi di Romantik Online	30
Gambar 7	: Persentase kepuasan pengguna data terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan BPS	39
Gambar 8	: Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2015-2020	40
Gambar 9	: Capaian Kinerja Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat BPS Kota Palembang Tahun 2017-2020	42
Gambar 10	: Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	43
Gambar 11	: Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Rencana Strategis 2020-2024	45
Gambar 12	: Piagam Penghargaan Satker WBK	49
Gambar 13	: Hasil Penilaian desk Evaluation Implementasi SAKIP BPS Selindo Tahun 2020	50
Gambar 14	: Piagam Penghargaan sebagai Satker dengan Website terbaik Ketiga	50
Gambar 15	: Talk Show di Lanugraha 105 FM	52
Gambar 16	: Supervisi dan Pencacahan Podes	57
Gambar 17	: Revisi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang	76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Reviu Rencana Strategis BPS Kota Palembang 2020-2024	79
Lampiran 2	: Perjanjian Kinerja (PK) 2020	80
Lampiran 3	: Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kota Palembang	82
Lampiran 4	: Sumber Daya Manusia BPS Kota Palembang	83
Lampiran 5	: Kegiatan BPS Kota Palembang 2017	84
Lampiran 6	: Response Rate Survei BPS Kota Palembang	86
Lampiran 7	: Jumlah Publikasi BPS Kota Palembang	88





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPS Kota Palembang disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi BPS yaitu **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”** (**“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”**) merupakan harapan dan tekad BPS Kota Palembang. Keinginan pengguna data baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS Kota Palembang kedepan harus mampu menyajikan data, dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi, tata laksana penyediaan data dan informasi, yang didukung SDM professional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Palembang yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kota Palembang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, maka BPS Kota Palembang memiliki tujuan. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. BPS Kota Palembang memiliki

empat tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020 sampai 2024, yaitu (1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan (2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN (3) Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dan (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Tabel 1 Capaian Kinerja, Penyerapan anggaran dan Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	110	98,54	1,46
	1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	110	98,54	1,46
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	100	0	100
	2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	100	0	100
3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	100	90,63	9,37
	3.1 Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I	100	90,63	9,37
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	101,54	98,75	1,25
	4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	101,54	98,75	1,25
	Rata-Rata	102,88	98,62	1,37

Secara keseluruhan BPS Kota Palembang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 102,88 persen. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari efisiensi BPS Kota Palembang sebesar 1,37 persen dan penyerapan anggaran 98,62 persen.

Pada Tujuan Pertama “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” penyerapan anggaran sebesar 98,54 persen terdapat efisiensi sebesar 1,46 persen dengan nilai capaian kinerja 110 persen. Tujuan kedua “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN” yaitu pengumpulan survei kebutuhan data dan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus telah selesai dilakukan. Akan tetapi Pertanggungjawaban keuangan untuk pengumpulan survei kebutuhan data dan metadata sektoral khusus tidak melalui perjalanan dinas tetapi hanya melalui pengunjung yang datang ke PST BPS Kota Palembang, melalui link online dan telepon sehingga uang harian perjalanan dinas tidak dapat terserap mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi nihil.

Penyerapan anggaran tujuan ketiga “Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” yaitu sebesar 90,63 dengan capaian kinerja 100 persen dan efisiensi sebesar 9,37 persen. Sedangkan penyerapan pada tujuan ke empat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” sebesar 98,75 persen dengan capaian kinerja 101,54 persen dan efisiensi 1,25 persen.



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik mengamankan BPS bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyedia data atau informasi sekaligus sebagai koordinator perstatistikan di Indonesia. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, atau masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2020 BPS Kota Palembang melaksanakan 5 kegiatan prioritas nasional yaitu Sensus Penduduk, Pendataan Podes, Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area. Sensus Penduduk merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali atau perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP2020 menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”. Data yang dihasilkan, meliputi jumlah orang, jenis kelamin, usia, kepemilikan KTP dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Adanya pandemi covid19 pada tahun 2020 menjadi tantangan berat pada pelaksanaan SP2020. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 mendorong BPS melakukan penyesuaian tata kelola pada setiap tahapan proses bisnis dengan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020.

Selain kegiatan SP2020, BPS Kota Palembang juga pada tahun 2020 melaksanakan penancangan pembangunan zona integritas dilingkungan BPS Kota Palembang dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah birokrasi Bersih dan melayani. Pada akhir tahun BPS Kota Palembang mendapat penghargaan dari Kepala BPS RI sebagai satuan kerja

berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020.

Selain itu, BPS selalu berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna data dalam memproduksi dan menyajikan data statistik. Hal tersebut merupakan suatu keharusan sebagai lembaga publik penyedia data dan informasi statistik sekaligus sebagai wujud tanggung jawab dan amanat pemerintah yang diemban. Melalui Advance Release Calendar (ARC) terangkum publikasi dan berita resmi statistik yang akan terbit pada tahun yang bersangkutan. ARC tersebut disajikan pada website BPS Kota Palembang. Publikasi yang diterbitkan di website BPS Kota Palembang yaitu Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2020, Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang tahun 2020, Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020, Statistik Daerah Kota Palembang, Kota Palembang Dalam Angka 2020 Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan, PDRB Kota Palembang menurut Lapangan Usaha 2015-2019, Kota Palembang Dalam Angka 2020 dan PDRB Kota Palembang menurut pengeluaran Tahun 2015-2019. Dan wujud dari kerja keras dan kerja cerdas Tim BPS Kota Palembang, pada akhir tahun 2020 memperoleh penghargaan dari BPS Provinsi Sumatera Selatan sebagai Satker dengan website terbaik ketiga di lingkungan BPS Propinsi Sumatera Selatan.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, BPS Kota Palembang telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun. Pada awal tahun BPS Kota Palembang telah menyusun Perjanjian Kinerja. Target kinerja yang telah ditetapkan diukur capaiannya dan dipantau secara periodik setiap bulan, triwulanan dan tahunan. Pada akhir tahun dapat diketahui hasil akhir pencapaian target dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas BPS sebagai

penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala BPS Kota Palembang kepada pemerintah atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan diawal tahun 2020, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Mengevaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPS Kota Palembang
- Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Badan Pusat Statistik Kota Palembang sebagai instansi yang mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kepercayaan dari masyarakat;
- Umpan balik peningkatan kinerja aparatur Badan Pusat Statistik Kota Palembang dalam perbaikan manajemen kinerja secara benar, nyata dan bertanggung jawab;
- Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik Kota Palembang
- Mendorong transparansi dan penyelenggaraan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun secara berkesinambungan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berupa :

- Hasil (*Outcome*): Bagaimana Tingkat pencapaian Kinerja yang diharapkan Terwujud, berdasarkan Output (Keluaran) atas Kebijakan atau Program yang sudah dilaksanakan
- Keluaran (Output): Bagaimana Produk yang Dihasilkan secara Langsung oleh adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan Input (Masukan) yang digunakan.

Standar bagi dasar melakukan Evaluasi Kinerja adalah:

- Ketaatan (*compliance*) berkaitan dengan upaya audit, dengan mempertanyakan sejauh mana transaksi oleh pemerintah yang dalam hal ini, BPS Kota Palembang, apakah telah sejalan atau sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah yang dalam hal ini, BPS Kota Palembang, telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan;
- Efektivitas (*Effectiveness*) berkaitan dengan sejauh mana Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan atas dasar Pemanfaatan Sumber Daya Publik.

### 1.3 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kota Palembang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. BPS sedang berada dalam masa transisi, mendukung kebijakan pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi, mengurangi tingkat eselon untuk kemudian dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional secara bertahap. Menggunakan dasar hukum Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, dan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, pada masa transisi ini. Mengingat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 baru ditetapkan pada 17 Desember 2020.

Kedudukan BPS Kota Palembang adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi.

### 1) Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Bab III Bagian Kesatu pasal 10 disebutkan bahwa BPS Kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### 2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Palembang menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan statistik dasar di kota Palembang.
- b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Palembang.
- c) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik di Kota Palembang.
- d) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota Palembang.

### 3) Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Palembang, yaitu :

#### 1. Kepala

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang mempunyai tugas memimpin BPS Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna.

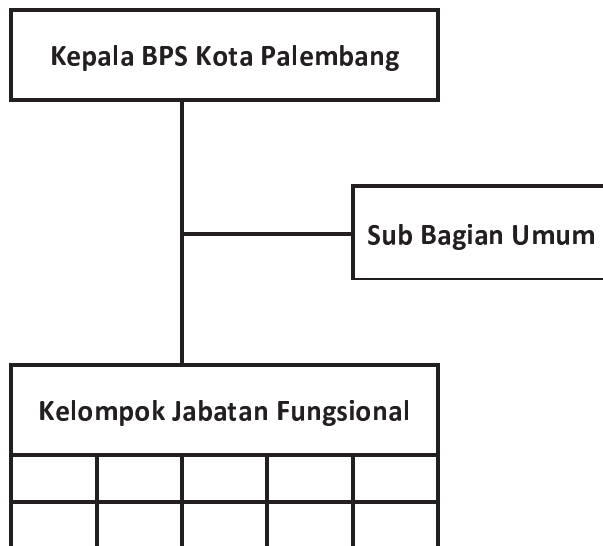
#### 2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

### 3. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi dan BPS Kota Palembang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPS Provinsi dan BPS Kota Palembang.
- Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Secara rinci bagan organisasi BPS Kota Palembang :



### Wilayah Administrasi Kerja BPS Kota Palembang

Wilayah Administrasi Kerja BPS Kota Palembang yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yaitu 18 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Kecamatan di Kota Palembang

No	Kode	Kecamatan
1.	010	Ilir Barat Dua
2.	011	Gandus
3.	020	Seberang Ulu Satu
4.	021	Kertapati
5.	022	Jakabaring
6.	030	Seberang Ulu Dua
7.	031	Plaju
8.	040	Ilir Barat Satu
9.	041	Bukitkecil
10.	050	Ilir Timur Satu
11.	051	Kemuning
12.	060	Ilir Timur Dua
13.	061	Kalidoni
14.	062	Ilir Timur Tiga
15.	070	Sako
16.	071	Sematangborang
17.	080	Sukarami
18.	081	Alang-Alang Lebar

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kota Palembang dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

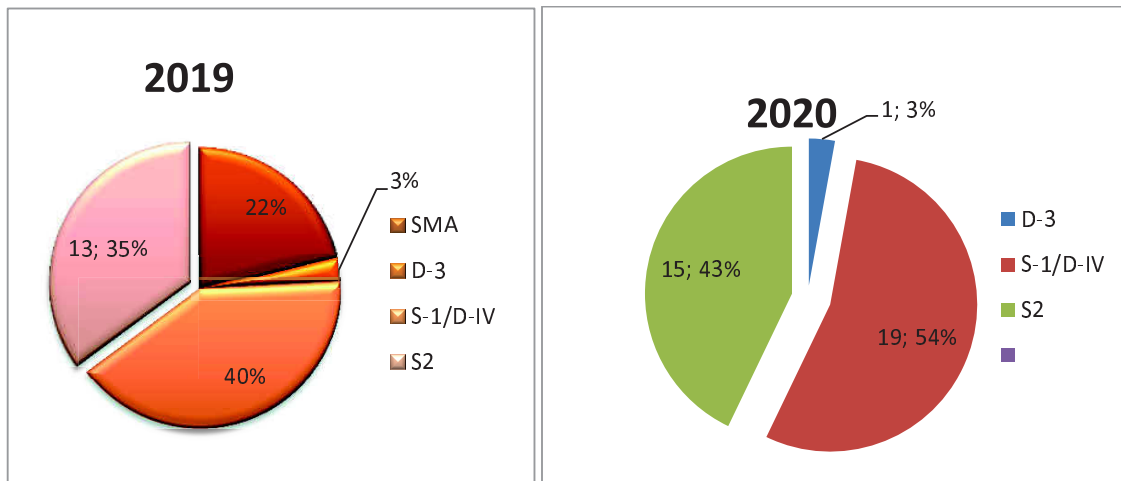
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

#### 1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kota Palembang

Sumber daya manusia adalah salah satu asset organisasi yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan. Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPS Kota Palembang sampai dengan akhir tahun 2020 berjumlah 42 orang yang terdiri dari 15 orang yang berpendidikan S2, 19 orang pegawai berpendidikan S1/D-IV, 1 orang pegawai yang berpendidikan D-3 dan 7 orang yang berpendidikan SMA. Jadi hampir 35,71 persen pegawai memiliki pendidikan S2, 45,24 persen berpendidikan S1/D-IV, 2,38 persen berpendidikan D3 dan 16,67 persen berpendidikan SMA. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan kinerja suatu instansi.

Gambar 1. SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan



Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota terdapat perubahan susunan organisasi di BPS Kota Palembang sehingga menjadi :

1. Kepala
2. Subbagian Umum

### 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan struktural pada periode sebelumnya berubah menjadi kelompok jabatan fungsional.

Komposisi pegawai BPS Kota Palembang menurut jabatan sebagai berikut :

**Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang**

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Kepala	1
2	Kepala Subbag. Umum	1
3	Kelompok Jabatan Fungsional :	
	Statistisi Ahli Muda	7
	Pranata Komputer Ahli Muda	1
	Statistisi Ahli Pertama	7
	Statistisi Pelaksana Lanjutan	3
	Fungsional Umum	22

Berdasarkan Peraturan Kepala (PERKA) BPS Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/Inpassing. Pada tahun 2020 terdapat 7 pegawai yang mengikuti ujian kompetensi tahun 2020 dan 1 pegawai yang telah keluar SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Statistisi melalui penyesuaian/inpassing. Sehingga pada Tahun 2020 pegawai yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 18 orang atau 42,86 persen dari seluruh pegawai yang terdiri dari 7 orang statistisi Ahli Muda/Muda, 1 orang pranata komputer ahli muda, 7 orang Statistisi Pertama dan 3 orang Statistisi Pelaksana Lanjutan.

**Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
IV	8	19,04
III	27	64,28
II	7	16,67
Jumlah	42	100,00

Tabel 5. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2020

Usia	Jumlah (orang)	Persentase
>50	9	21,43
41-50	10	23,81
31-40	19	45,24
<30	3	7,14
Jumlah	85	100,00

### 1.5 Potensi dan Permasalahan

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan badan pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Data yang berkualitas sangat membantu pemerintah dalam menghasilkan keputusan/kebijakan yang tepat. Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah.

Penyebarluasan data BPS kepada masyarakat menjadi sorotan utama pihak luar, baik oleh sesama instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, penyajian dan penyebarluasan data perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Pintu gerbang penyebarluasan data BPS adalah Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Melalui PST konsumen data (mahasiswa, peneliti, pemerintah, masyarakat, pelajar dan lain-lain) dapat memperoleh data yang diperlukan baik untuk skripsi, tugas sekolah dan kuliah, untuk pengambilan kebijakan pemerintah dan sebagainya.

Menjawab harapan dan tuntutan terhadap data yang berkualitas menjadi tantangan untuk meningkatkan peran BPS Kota Palembang sebagai satu-satunya badan penyedia data yang berkualitas dan terpercaya bagi semua pihak. Tantangan yang dihadapi tahun 2020 ini sangat berat bagi BPS dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Dengan adanya PSBB, penerapan protokol kesehatan, tentunya pengumpulan data lewat wawancara langsung menemui kendala, petugas BPS juga harus menaati setiap protokol kesehatan, juga responden yang cukup hati-hati saat dimintai keterangan sehingga pengumpulan data

menjadi agak terganggu. Selain itu tantangan perubahan yang dihadapi BPS Kota Palembang antara lain:

- a) Tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhadap ragam dan kualitas data statistik semakin meningkat.
- b) Proses bisnis survey-survey belum terencana dengan baik, dimana jadwal survey yang sifatnya tahunan sering menumpuk dalam 1 waktu, sehingga terkendala dalam penyiapan SDM dan persiapan lapangan lainnya.
- c) Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro
- d) Mandat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu
- e) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS
- f) Ada kecenderungan masyarakat enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan elit.
- g) Rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan benar, menyebabkan kualitas data dan response rate rendah.
- h) Koordinasi antara BPS Kota Palembang dengan instansi lain masih perlu ditingkatkan supaya peran BPS sebagai pembina statistik sektoral akan semakin baik.

### **1.6. Sistematika Penyajian Laporan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang selama Tahun 2020. Capaian Kinerja Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) 2020 dan Rencana Strategis 2020-2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta Sumber Daya Manusia BPS Kota Palembang serta potensi dan permasalahan di BPS Kota Palembang.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2020

**Bab III Akuntabilitas Kinerja** , menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang terdiri dari Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2020, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang tahun 2020 terhadap tahun 2019 dan target Renstra 2020-2024 , Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, upaya efisiensi dan kinerja anggaran

**Bab IV Penutup** , menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2020.



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024

Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem *reward and punishment*, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan lain-lain.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2020-2024 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, BPS Kota Palembang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, dan pembinaan kepada seluruh unit organisasi di BPS Kota Palembang.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah dibidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang objektif, akurat, tepat waktu, terpercaya dan lengkap. Untuk itu, Badan Pusat Statistik Kota Palembang perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan dibidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good government* dan *clean government* tersebut.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi;
3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS Kota Palembang untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdasarkan misi pembangunan nasional tersebut BPS Kota Palembang menetapkan visi tahun 2020-2024 yang mengacu pada Visi BPS RI : **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Palembang yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kota Palembang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi :

- *relevance* (relevansi)

- *accuracy* (akurasi)
  - *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu)
  - *accessibility* (aksesibilitas)
  - *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan)
  - *interpretability* (interpretabilitas).
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan  
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
  3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional  
Tujuan utama dalam pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat. Parasuraman (2001) menyatakan bahwa terdapat lima unsur penting yang menentukan kepuasan yaitu *responsiveness*, *assurance*, *tangible*, *empathy* dan *reliability*. BPS Kota Palembang telah mengadakan survei kebutuhan data untuk mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta memberikan pelayanan yang baik.
  4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah  
Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu Pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik harus terus dilakukan.

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, maka BPS Kota Palembang memiliki tujuan. Tujuan dalam Rencana Strategis BPS Kota Palembang adalah suatu keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. BPS Kota Palembang memiliki empat tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020 sampai 2024. Tujuan BPS Kota Palembang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

### **Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**

Indikator Tujuan 1: Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Mencakup dua sasaran strategi yang ditetapkan yaitu :

- 1.1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional
- 1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

### **Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN**

Indikator Tujuan 2: Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Mencakup satu sasaran strategi yang ditetapkan yaitu :

- 1.1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- 1.2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

### **Tujuan 3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**

Indikator Tujuan 3 : Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I

Mencakup satu sasaran strategi yang ditetapkan yaitu :

- 3.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

### **Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**

Indikator Tujuan 3 : SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Mencakup dua sasaran strategi yang ditetapkan yaitu :

- 4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- 4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran - sasaran strategisnya BPS Kota Palembang menetapkan arah kebijakan seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 sebagai berikut :

**1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan**

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

**2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS**

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system (DSS)*.

**3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS**

**Sasaran :**

- Meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru
- Meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*
- Meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar
- Meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*

Pada tahun 2019 program yang dilaksanakan BPS Kota Palembang mencakup 3 program yang meliputi dua program teknis dan satu program generik, dan pada Tahun 2020 berubah menjadi 2 program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) merupakan program generik
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) merupakan program teknis

Penyederhanaan program dimaksudkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Program PSPA dimasukkan dalam program DMPTTL dalam output Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, yang terdiri dari output sebagai berikut :

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
3. Layanan Perkantoran

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kota Palembang secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2020 adalah penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang komponennya sebagai berikut :

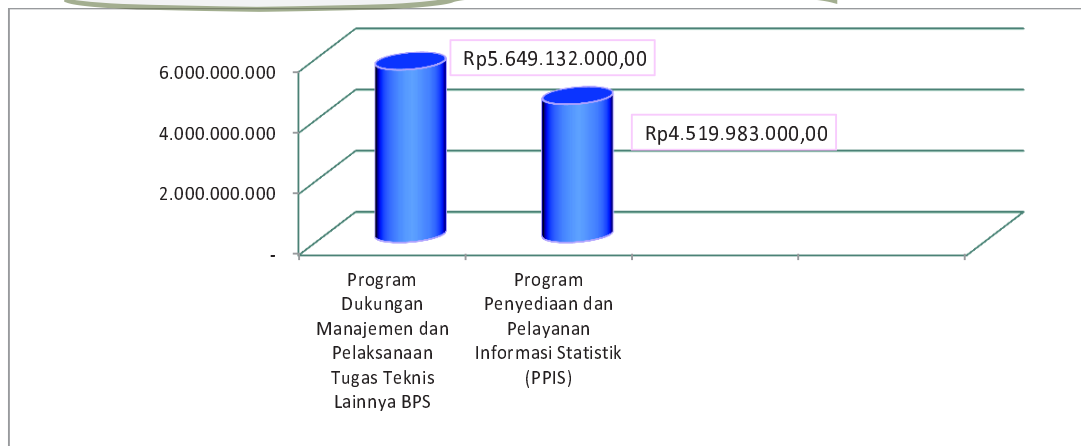
1. Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi
2. Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus
3. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran
4. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan
5. Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi
6. Penyusunan Statistik Politik Keamanan

7. Survei Perilaku Anti Korupsi
8. Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa tahun 2019
9. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH
10. Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP
11. Survei Perusahaan Kehutanan
12. Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan
13. Survei Industri Besar/Sedang Tahunan
14. Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan
15. Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan
16. Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori
17. Survei Konstruksi
18. Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan
19. Kompilasi Data Transportasi
20. Survei Angkutan Penumpang dan Barang Di Terminal dan Jembatan Timbang
21. Survei Perdagangan Antar Wilayah
22. Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan
23. Survei Harga Perdagangan Besar
24. Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras
25. Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal
26. Survei Bidang Jasa Pariwisata
27. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010:100
28. Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT /IO SISI USES
29. Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO SISI USES
30. Penyusunan Komponen PMTB dan Inventori Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO SISI USES
31. Penyusunan Konsolidasi PDRBPengeluaran Triwulanan dan Tahunan
32. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
33. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area

34. Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian
35. Survei Perusahaan Perkebunan
36. Indeks Kemahalan Konstruksi
37. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
38. Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik SP20

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut BPS Kota Palembang mendapat anggaran sebesar Rp. 20.550.154.000, dan direvisi menjadi Rp. 10.169.115.000,-, yang terdiri Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar Rp.5.649.132.000,- dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp.4.519.983.000,- .

Gambar 2. Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2020



## 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2020

Selama periode tahun 2020 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan Reviu Perjanjian Kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kota Palembang, yang disusun dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun 2020.

Tabel 6. Reviu Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2020

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>				
	1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	58,28
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	3,85
<b>2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>				
	2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	33,33
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	Persen	10
<b>3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>				
	3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	Persen	2,5
<b>4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>				
	4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	69
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	80

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2020



Untuk mendukung pelaksanaan sistem pengukuran kinerja, pemerintah telah membuat sistem pengukuran kinerja dengan nama sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil monitoring capaian kinerja digunakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pencapaian kinerja. Dengan demikian diharapkan kendala yang ditemui dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPS Kota Palembang dapat diantisipasi lebih awal.

Berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024 terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kota Palembang pada Tahun 2020 yaitu:

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

### Capaian Kinerja Tujuan Pertama



Tujuan Pertama terdiri dari satu sasaran strategis yaitu: Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan indikator:

1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.
2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					

1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	58,28	100	120
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	3,85	3,85	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama</b>					<b>110</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tujuan pertama telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 110 persen. Sasaran strategis tujuan pertama terdiri dari 2 indikator dan masing-masing indikator telah mencapai target yang ditetapkan.

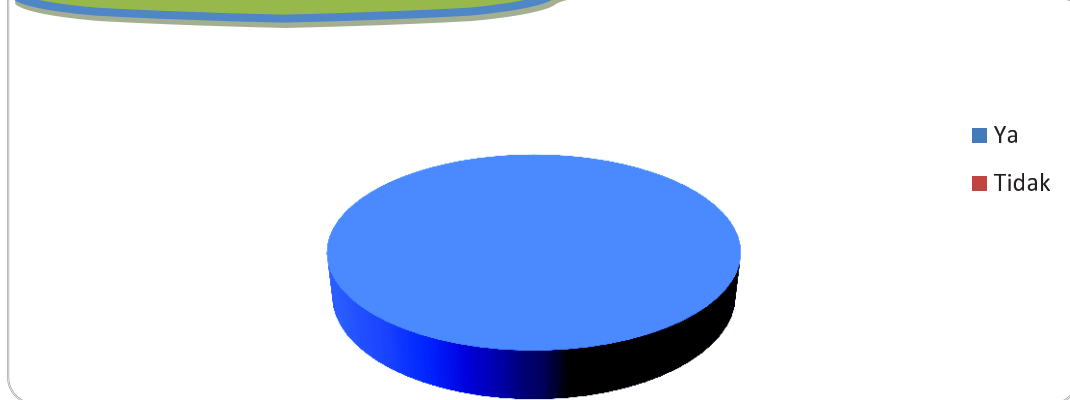
Indikator Pertama Sasaran Strategis Pertama diperoleh berdasarkan hasil survei kebutuhan data tahun 2020 dengan rumus :

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

P = Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi  
x = Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi  
y = Jumlah seluruh konsumen

Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Monitoring yaitu mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi pembangunan adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.

Gambar 3 Persentase Konsumen di PST BPS Kota Palembang yang berasal dari K/L/OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional



Berdasarkan hasil survei kebutuhan data dapat diperoleh hasil dari Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional adalah sebesar 100 persen sehingga capaian kinerjanya menjadi 120 persen. Berbagai macam produk statistik di BPS Kota Palembang diantaranya publikasi dan Berita Resmi Statistik dimaksudkan untuk memotret serta menyajikan indikator-indikator penting yang menggambarkan tentang kondisi daerah dalam bentuk tampilan uraian deskriptif. Dengan produk ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan pembangunan di berbagai sektor serta membantu para pengguna data lainnya dalam memahami kondisi daerah. Data BPS Kota Palembang telah banyak digunakan oleh masyarakat baik oleh pemerintah daerah, akademisi, pihak peneliti dan sebagainya dapat dilihat dari jumlah visitor website selama 3 tahun. Dari tabel tersebut terlihat jumlah visitor website BPS Kota Palembang selalu mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 8 : Jumlah Pengunjung Website BPS Kota Palembang

Tahun	Jumlah Pengunjung
2018	37.139
2019	49.352
2020	54.594

Gambar 4: Pengunjung Website BPS Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2020



Indikator kedua Sasaran Strategis pertama yaitu Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Pada tahun 2020 BPS Kota Palembang hanya menyusun satu publikasi yang menerapkan standar akurasi dari 26 publikasi BPS Kota Palembang sehingga capaian kinerja 100 persen dengan realisasi 3,85 persen dan target 3,85 persen. Publikasi yang menerapkan standar akurasi yaitu Statistik Kesejahteraan Kota Palembang 2020. Data dan

informasi diperlukan dalam rangka mendukung proses perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan agar dapat berjalan dengan baik. Data mengenai keadaan sosial ekonomi dibutuhkan untuk memberikan gambaran pencapaian pembangunan dan juga dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk mengevaluasi program-program pembangunan. Data yang terkait dengan kebutuhan hidup masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan kerja diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil-hasil pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dirancang untuk menghasilkan data sosial ekonomi penduduk di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, kriminalitas, sosial-budaya, perjalanan wisata, dan perlindungan sosial.

Gambar 5 Publikasi BPS Kota Palembang yang menerapkan standar akurasi



## Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua terdiri dari 1 sasaran strategis yaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan 2 indikator yaitu :

1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadana sektoral dan khusus sesuai standar

Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kota Palembang Tahun 2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	33,33	33,33	100
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	10	10	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua</b>					<b>100</b>

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Menurut PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2 menjelaskan bahwa penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. BPS wajib meneliti dan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan survei sektoral, meliputi:

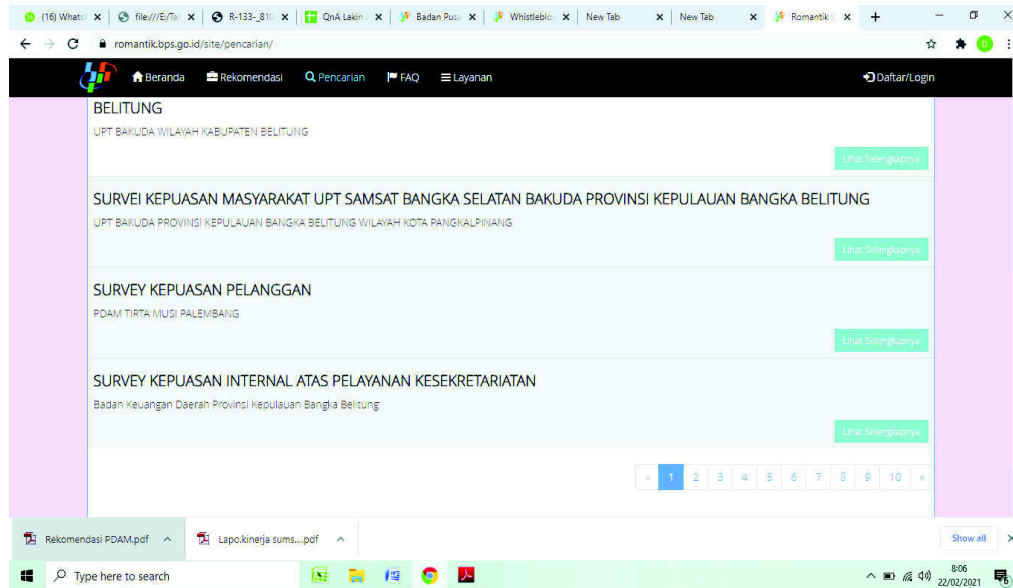
1. Tujuan Survei

2. Jenis data yang akan dikumpulkan
3. Wilayah kegiatan statistik
4. Metode statistik yang akan digunakan
5. Objek populasi dan jumlah responden
6. Waktu pelaksanaan

Rekomendasi perlu dilaksanakan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral dan membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional.

Untuk meningkatkan pemahaman K/L/OPD akan pentingnya rekomendasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan statistik oleh K/L/OPD, pada tahun 2020 BPS Kota Palembang melakukan kunjungan atau sosialisasi ke 3 instansi dalam rangka rekomendasi statistik yaitu ke PDAM Tirta Musi Palembang, Bappeda Kota Palembang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Kunjungan dan sosialisasi tersebut dalam rangka memberikan informasi tata cara pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dan rancangan penyelenggaraan survei dengan menggunakan formulir pemberitahuan kegiatan statistik sektoral (FS3) dan bagaimana penggunaan romantik online. Romantik online adalah suatu aplikasi berbasis web untuk pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik. Aplikasi pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik mulai dari tahapan pemberitahuan kegiatan statistik oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah (K/L/OPD) ke BPS hingga keluarnya surat rekomendasi dari BPS ke (K/L/OPD). Dari 3 instansi tersebut hanya PDAM Tirta Musi Palembang yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dan telah mendapat surat rekomendasi dari Kepala BPS Kota Palembang pada tanggal 30 Desember 2020. Daftar kegiatan statistik ini dapat diakses pada website <https://romantik.bps.go.id/site/pencarian/> website rekomendasi statistik (Romantik) online. Dari capaian tersebut realisasi dari persentase jumlah K/L/OPD yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik yaitu sebesar 33,33 persen dari target 33,33 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

Gambar 6. Survei Kepuasan Pelanggan PDAM Tirta Musi di Romantik Online



Indikator Kedua sasaran strategis pertama dari tujuan kedua yaitu Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Metadata adalah Informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata. Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

Dari target 40 K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar, hanya 4 metadata yang terkumpul. Pada tahun sebelumnya terdapat 7 instansi yang menyampaikan metadata statistik sektoral dan khusus yaitu :

1. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang
3. Dinas Sosial Kota Palembang
4. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
5. Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Selatan

6. Dinas Pertanian Kota Palembang
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Pengumpulan Metadata Kegiatan Statistik dasar, sektoral dan khusus lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 16 metadata. Salah satu penyebabnya karena adanya pandemi covid19, sehingga kegiatan Statistik sektoral/khusus yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan lagi pada tahun ini dan hanya satu instansi yang melaksanakan yaitu Bank Indonesia. Selain itu BPS Kota Palembang juga melakukan koordinasi dengan OPD lain yang melaksanakan penyusunan statistik sektoral. Dari hasil penelusuran di dapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan statistik sektoral. Dengan capaian ini maka capaian kinerja BPS Kota Palembang mencapai 100 persen.

Kendala/permasalahan dalam penyampaian metadata statistik sektoral dan khusus :

1. Kesulitan mengidentifikasi instansi mana saja yang pernah melakukan kegiatan statistik khusus dan sektoral
2. Kesulitan dalam menjelaskan kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan statistik sektoral dan khusus kepada responden.
3. Pada tahun 2020 terdapat kendala pandemi covid19

Strategi dalam mengatasi kendala :

1. Menjelaskan secara detil kegiatan apa saja yang bisa dikategorikan ke dalam kegiatan statistik sektoral dan statistik khusus.

### **Capaian Kinerja Tujuan Ketiga**

Tujuan Ketiga terdiri dari satu sasaran strategis “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I” dengan satu indikator yaitu Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik

sektoral secara mandiri sesuai NSPK. Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10 . Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Tahun 2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	2,5	2,5	100
Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ketiga					100

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral, BPS melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan secara berkala. Kurangnya pemahaman kaidah-kaidah penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sehingga BPS Kota Palembang menyelenggarakan sosialisasi ke PDAM, Bappeda Kota Palembang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Pada tahun 2020 PDAM telah melaksanakan statistik mandiri “Survei Kepuasan Pelanggan” untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan PDAM Tirta Musi Palembang. Populasi semua pelanggan PDAM Tirta Musi sedangkan sampel diambil dari pelanggan pada

masing masing unit pelayanan secara proporsional. Dari 40 K/L/D/I hanya PDAM Tirta Musi telah mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, sehingga realisasi capaian kinerja menjadi 2,5 persen dengan target 2,5 persen, dengan capaian kinerja 100 persen.



### Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Kinerja Tujuan keempat terdiri dari satu sasaran strategis “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” dengan 2 indikator kinerja utama :

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Tahun 2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	69	69,69	101
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	80	81,67	102,88
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat					101,54

### Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berdampak pada kehidupan bernegara, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan *good governance*, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan. Dalam mewujudkan *good government* perlu dilaksanakan penilaian pencapaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP Instansi Pemerintah. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) menugaskan kepada seluruh jajaran Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di lingkungan Instansi masing-masing untuk melaksanakan “Evaluasi” sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang “Pedoman Evaluasi Atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang “Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”. Sesuai dengan surat dari Inspektur Wilayah I Nomor : R-133/08100/PW.110/02/2021 tentang Hasil penilaian *Desk Evaluation* Implementasi SAKIP se Indonesia Tahun 2020 bahwa penilaian SAKIP BPS Kota Palembang oleh inspektorat sebesar 69,69 point dengan target 69 point, sehingga capaian kinerja BPS Kota Palembang tahun 2020 sebesar 101 persen.

Pada tahun 2020 BPS Kota Palembang mendapat penghargaan dari BPS RI sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilindungi Badan Pusat Statistik. Penghargaan ini merupakan tantangan bagi BPS Kota Palembang untuk bekerja bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan menghasilkan statistik yang berkualitas.

BPS Kota Palembang telah memiliki Indikator Kinerja Individu dan diimplementasikan dalam penilaian kinerja pegawai dalam bentuk penilaian CKPT dan CKPR. Penilaian CKPT dan CKPR pegawai tersebut dengan pertimbangan penilaian Kepala Seksi dan Kasubbag. Tata Usaha sesuai dengan capaian kerjanya. Dan pada Tahun 2020 BPS Kota Palembang telah memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan Indikator Kinerja Individunya . Penghargaan diberikan sesuai dengan hasil capaian kinerja yang bersangkutan dan menambahkan inovasi dan softskill. Kasi, KSK dan staf yang mendapat penghargaan adalah pegawai dengan nilai capaian kinerja baik ditambah dengan inovasi dan softskillnya. Pada tahun 2019 BPS Kota Palembang memberikan punishment terhadap pegawai yang kurang disiplin.

Dalam rangka evaluasi kinerja dilakukan rapat antar Kasi yang membahas capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulan, rapat target dan realisasi Renstra 2020-2024 dalam rangka penetapan kinerja 2020 dan rapat pembahasan target dan realisasi Renstra 2020-2024. Pelaksanaan rapat tersebut telah didokumentasikan. Melalui evaluasi tersebut setiap Kasi dapat memonitor pelaksanaan kegiatan sehingga terhadap kegiatan yang belum tercapai dilakukan kunjungan ulang. Selain itu BPS Kota Palembang juga melakukan monitoring atas Rencana Strategis 2020-2024, sehingga pimpinan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap kegiatan yang belum mencapai target.

## Persentase Kepuasan Pengguna data Terhadap pemenuhan Sarana dan prasarana Pelayanan BPS

Indikator sasaran strategis tujuan keempat yaitu Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

P = Persentase kepuasan pengguna data terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan BPS  
 x = Jumlah konsumen data yang merasa puas dengan sarana dan prasarana BPS  
 y = Jumlah seluruh konsumen

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Sarana prasarana pendukung pelayanan



meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus, serta aplikasi pelayanan online bagi responden online.

Sarana dan prasarana yang baik merupakan saah satu komponen dalam pelayanan. BPS Kota Palembang telah memiliki gedung untuk ruangan

Pelayanan Statistik Terpadu. Ruangan tersebut telah dilengkapi fasilitas komputer dan jaringan wifi, Layanan meja konsultasi statistik, sarana pengaduan, kotak saran dan informasi standar pelayanan.

Untuk layanan konsultasi statistik BPS Kota Palembang telah memberikan jadwal kepada petugas untuk melayani konsultasi. Pada masa pandemi ini jadwal konsultasi dilakukan secara bergantian. Apabila petugas berhalangan maka seluruh pegawai BPS Kota Palembang yang mengerti dan memahami dapat melayani konsultasi statistik.

Kotak saran telah tersedia di PST BPS Kota Palembang sehingga konsumen yang datang ke PST BPS Kota Palembang dapat mengajukan saran agar kenyamanan pelayanan yang diberikan dapat terjaga. Selain itu pada Website BPS Kota Palembang telah tersedia layanan bagi pengguna data untuk mengadukan pelanggaran yang berindikasi adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Materi pengaduan yang ditindaklanjuti pada sistem ini adalah laporan terkait pelanggaran berupa:

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Penyalahgunaan Wewenang
- Disiplin Pegawai
- Standar Pelayanan
- Hambatan Pelayanan

dan terhadap identitas diri setiap pelapor dijamin kerahasiaannya.



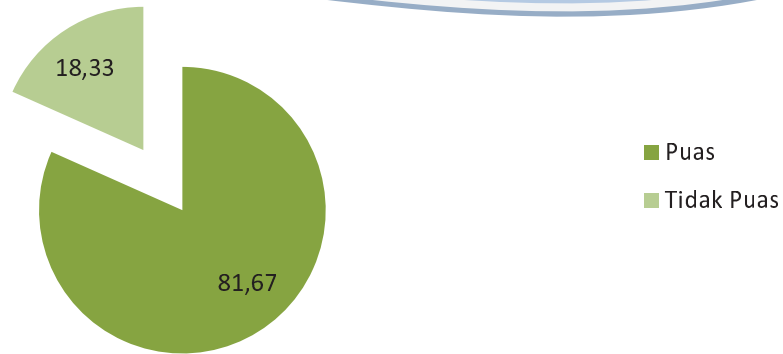


BPS Kota Palembang juga telah memiliki sarana pojok baca yang berisi novel dan buku-buku islami. Bagi setiap pengguna data dapat menggunakan fasilitas ini setelah datang mengunjungi PST.

Pada tahun 2019 Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Palembang melaksanakan "Mobil Keliling Statistik", yaitu fasilitas perpustakaan keliling namun karena kondisi pandemi Covid19 untuk sementara dihentikan. Diharapkan setelah pandemi covid19 berakhir dapat beroperasi kembali.

Fasilitas Perpustakaan Statistik Terpadu yang dimiliki oleh BPS Kota Palembang tersebut membuat pengguna layanan merasa nyaman datang ke BPS Kota Palembang. Pada tahun 2020 realisasi pengguna data yang merasa puas dengan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan di BPS Kota Palembang sebanyak 81,67 persen dari target Perjanjian Kinerja sebesar 80,00 persen sehingga capaian kinerja telah melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 102,09 persen.

Gambar 7. Persentase kepuasan pengguna data terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan BPS

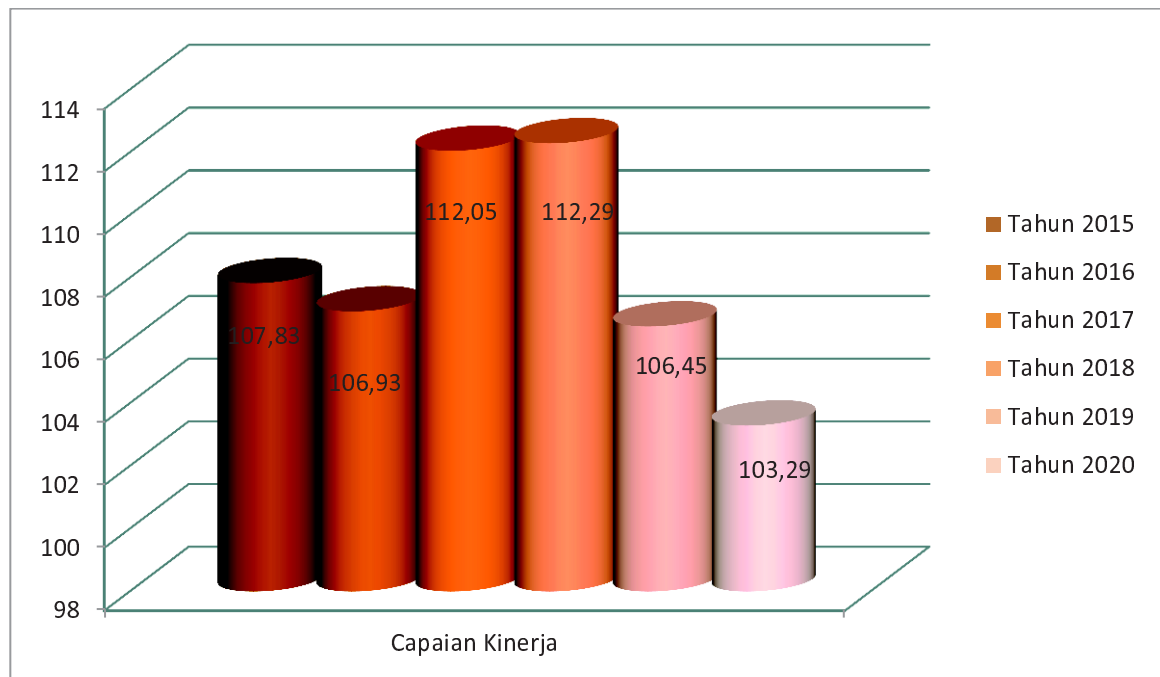


Secara keseluruhan pada tahun 2020 BPS Kota Palembang telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Capaian Kinerja yang diperoleh sebesar 102,88 persen.

### 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2015-2020

Perkembangan capaian kinerja antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan pencapaiannya karena terdapat beberapa perubahan pada indikator yang digunakan. Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020. Secara total capaian kinerja BPS Kota Palembang selama tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 8. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2015-2020



Pada tahun 2019 BPS Kota Palembang menitikberatkan peningkatan pada target PK. Terhadap pemasukan dokumen yang telah melebihi target 100 persen akan dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap target Perjanjian Kinerja tersebut. Metode ini mengakibatkan capaian kinerja total BPS Kota Palembang turun dibanding tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja yang masih terdapat pada Renstra 2020 – 2024 yaitu :

1. Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Penilaian Sakip BPS Kota Palembang yang dimulai pada tahun 2017 mendapat nilai sebesar 58,21 persen, terlihat peningkatan penilaian Sakip. Field Evaluation Implementasi Sakip dilaksanakan dengan mengevaluasi atas beberapa komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian sasaran / kinerja organisasi

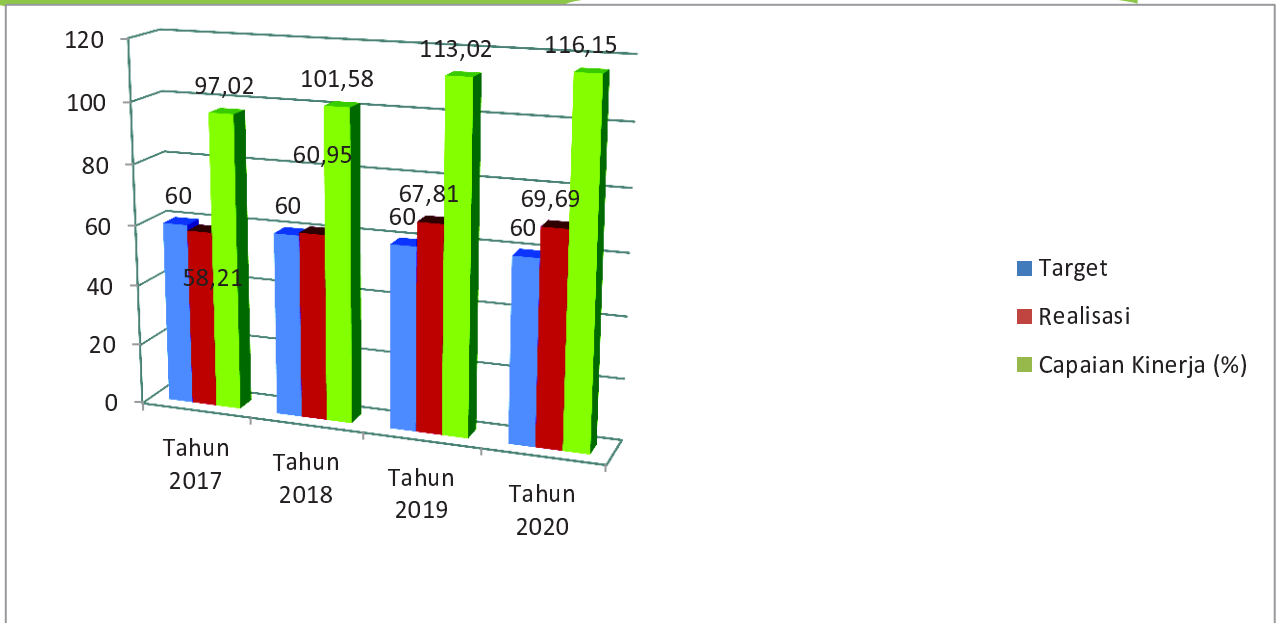
Perkembangan Capaian kinerja penilaian Sakip dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat Tahun 2015 -2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2017	60	58,21	97,02
2	2018	60	60,95	101,58
3	2019	60	67,81	113,02
4	2020	60	69,69	116,15

Capaian kinerja BPS Kota Palembang tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,70 persen, tahun 2019 meningkat 11,26 persen dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 2,77 persen dengan nilai capaian kinerja 116,15 persen. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa BPS Kota Palembang semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 9 Capaian Kinerja Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat BPS Kota Palembang Tahun 2017-2020



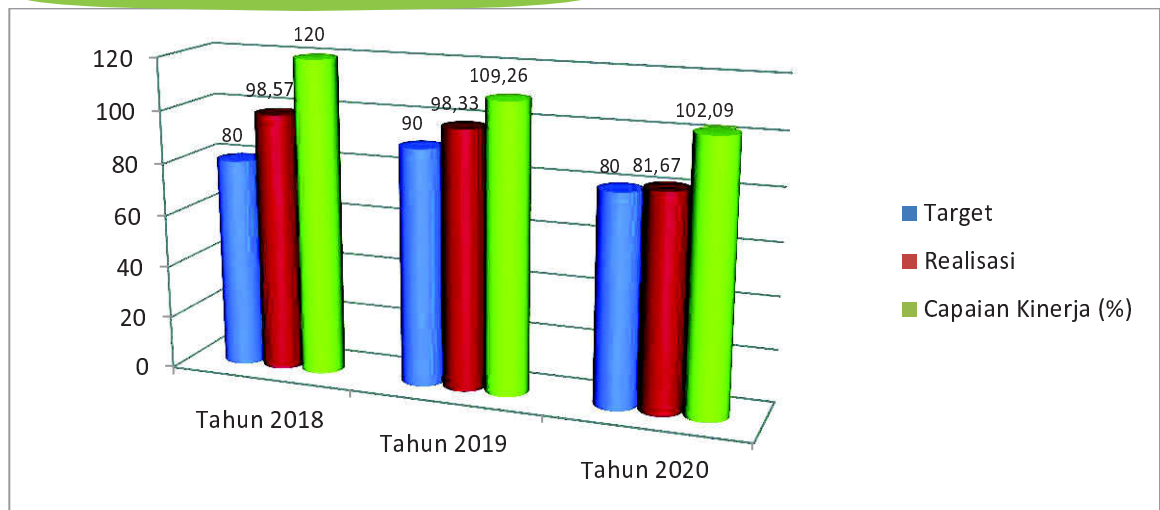
Indikator kinerja Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS selama tahun 2018 – 2020 terlihat penurunan. Perkembangan capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS selama tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	80	98,57	120
2	2019	90	98,33	109,26
3	2020	80	81,67	102,09

Capaian kinerja kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS tertinggi pada tahun 2018 dengan nilai capaian 120 persen dengan realisasi capaian kinerja 98,57 persen. Sedangkan capaian kinerja terendah pada tahun 2020 dengan nilai capaian kinerja sebesar 102,09 persen dengan realisasi 81,17 persen.

Gambar 10. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS



Penilaian indikator kinerja ini berasal dari survei kebutuhan data dan untuk tahun 2020 terdapat perubahan penghitungan. Pada tahun sebelumnya penghitungan sesuai cut off poin 5,5 dan pada tahun 2020 berubah menjadi 7,66 poin.

### 3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024

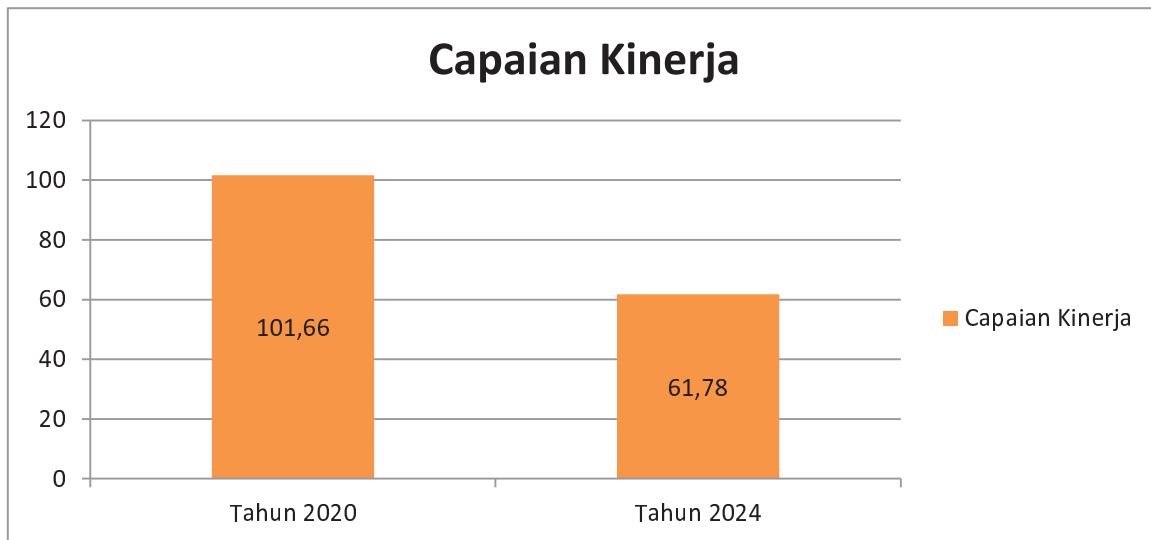
Capaian kinerja dengan target Renstra 2020 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Capaian Kinerja Rencana Strategis 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2020	Renstra Tahun 2020		Renstra Tahun 2024	
			Target (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				110		76,68
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	100	58,28	120	67,50	120
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	3,85	3,85	100	11,54	33,36
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				100		58,33
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	33,33	33,33	100	50	66,66
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	10	10	100	20	50

3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
3.1. Penguatan Statistik Sektorial K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	2,5	2,5	100	12,5	20
Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				96,64		92,12
4.2. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	69,69	69	101	73	95,46
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	81,67	88,51	92,27	92	88,77
Rata- rata Capaian Kinerja				101,66		61,78

Gambar 11. Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Rencana Strategis 2020-2024



Pada Tahun 2020 Capaian Kinerja BPS Kota Palembang sesuai dengan Renstra 2020-2024 menunjukkan keberhasilan dengan capaian kinerja total sebesar 101,66 persen. Dari 4 tujuan

hanya satu tujuan yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu tujuan keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” yang hanya mencapai 96,64 persen, dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS dengan capaian 92,27 persen.

Untuk tahun 2024 total capaian kinerja BPS Kota Palembang hanya sebesar 61,78 persen. Untuk mencapai kinerja tahun 2024 BPS Kota Palembang harus meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dalam rangka penyelenggaraan statistik, terutama dalam hal rekomendasi statistik. Hal ini dikarenakan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya belum terlalu familiar dengan kegiatan rekomendasi statistik. Dengan melaksanakan sosialisasi ke Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya tentang aplikasi Romantik Online, diharapkan setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan statistik melalui Romantik Online.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menjelaskan bahwa penyelenggara survei statistik sektoral wajib: (1) memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS; (2) mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan (3) menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. Kewajiban – kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda.

Selain itu BPS Kota Palembang juga akan meningkatkan pengumpulan metadata statistik sektoral dan khusus sesuai standar dan penyusunan publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional . Pengumpulan metadata sektoral dan khusus terlambat dikarenakan kondisi pandemi covid19 , diharapkan setelah tahun 2020 dan pandemi covid19 berakhir, maka pengumpulan metadata sektoral dan khusus meningkat kembali.

### **3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2020 ini melebihi hingga 100 persen. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori tinggi. Penyebab keberhasilan kinerja ini sebagai berikut :

1. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
3. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2020.
4. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Selain terdapatnya penyebab yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja . Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan antara lain :

1. Kurangnya pemahaman pengumpul metadata mengenai metadata dan cara pengisian dokumen metadata sektoral dan khusus sehingga penanggung jawab melaksanakan sosialisasi atau briefing petugas pengumpul metadata sektoral dan khusus dan BPS Kota Palembang telah membuat pedoman ringkas kegiatan statistik sektoral dan khusus sebagai pedoman dalam pengumpulan data.

2. Kurangnya pemahaman kementerian/lembaga/satuan perangkat daerah/instansi lainnya tentang kaidah-kaidah penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sehingga perlu dilakukan sosialisasi ke K/L/D/I tentang penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Kurangnya pemahaman akan pentingnya rekomendasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan statistik oleh K/L/D/I sehingga perlu dilakukan sosialisasi ke K/L/D/I tentang layanan rekomendasi statistik (Romantik Online)
4. Kurangnya pemahaman konsumen data terhadap layanan statistik yang ada di PST BPS Kota Palembang; Kurang/belum tersedianya data/publikasi yang sesuai kebutuhan konsumen data sehingga memberikan pemahaman kepada konsumen data tentang layanan statistik yang ada di PST
5. Salah satu dampak pandemi covid-19, kegiatan Statistik sektoral/khusus yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan lagi pada tahun ini sehingga BPS Kota Palembang mencari informasi kembali terkait kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh dinas/instansi.
6. Perencanaan yang telah dilaksanakan belum dapat sepenuhnya dijalankan dikarenakan masih terdapat perubahan pada target yang telah ditetapkan sehingga BPS Kota Palembang melaksanakan review terhadap target yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik.

### **3.5. Prestasi BPS Kota Palembang Tahun 2020**

Pada tahun 2020 beberapa prestasi yang diperoleh BPS Kota Palembang :

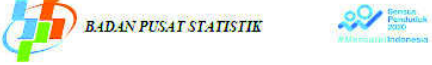

1. Dalam rangka mewujudkan unit kerja / satuan kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, BPS Kota Palembang berhasil memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020.

Gambar 12 . Piagam Penghargaan Satker WBK



2. Sesuai dengan surat dengan kepala BPS tanggal 18 Februari 2021 tentang Hasil Penilaian *Desk Evaluation* Implementasi SAKIP BPS Selindo Tahun 2020 bahwa BPS Kota Palembang memperoleh nilai Sakip dengan nilai 69,69, menempatkan BPS sebagai ranking ke 8 se Indonesia dan ranking pertama di BPS Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 13. Hasil Penilaian desk Evaluation Implementasi SAKIP BPS Selindo Tahun 2020

 <p><b>BADAN PUSAT STATISTIK</b></p> <p>Nomor : R-133/08100/PW.110/02/2021                  Lampiran : 1 (satu) set                  Perihal : Hasil Penilaian Desk Evaluation Implementasi SAKIP BPS Selindo Tahun 2020</p> <p>Jakarta, 18 Februari 2021</p> <p>Kepada Yang Terhormat                  Kepala Biro Bina Program                  di                  Jakarta</p> <p>Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, diperlukan penilaian SAKIP oleh Inspektorat Utama sebagai salah satu indikator kinerjanya. Oleh karena itu, bersama ini kami kirimkan Hasil Penilaian Desk Evaluation Implementasi SAKIP Tahun 2020 untuk keperluan pengisian indikator tersebut.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p>Mengantahi,                  Inspektur Wilayah I                    Yosef Ermaningrum</p> <p>Tembusan Kepada Yth:                  1. Inspektur Utama                  2. Sekretaris Utama</p> <p><small>Jl. dr. Soetomo No. 8-4, Jakarta 10718, Kode Pos 10020 Jakarta 10016, Telp. (021) 2941195, 2942096, 2942021-6, Fax. (021) 2937396                  Homepage : <a href="http://www.bps.go.id">http://www.bps.go.id</a> Email : <a href="mailto:bps@bps.go.id">bps@bps.go.id</a></small></p>	1600	1600 Sumatera Selatan	74,63
	1601	1601 Ogan Komering Ulu	63,45
	1602	1602 Ogan Komering Ilir	67,38
	1603	1603 Muara Enim	63,34
	1604	1604 Lahat	58,34
	1605	1605 Muzi Rawas	59,03
	1606	1606 Muzi Banyuasin	62,60
	1607	1607 Banyuasin	67,45
	1608	1608 OKU Selatan	61,48
	1609	1609 OKU Timur	61,70
	1610	1610 Ogan Ilir	60,23
	1611	1611 Kab. Empat Lawang	62,16
	1671	1671 Palembang	69,69
	1672	1672 Prabumulih	65,03
1673	1673 Pagar Alam	57,99	
1674	1674 Lubuk Linggau	58,59	

3. Dalam rangka pelayanan publik BPS Propinsi Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada BPS Kota Palembang atas prestasinya sebagai Satker dengan website terbaik ketiga

Gambar 14. Piagam Penghargaan sebagai Satker dengan Website terbaik Ketiga



### **3.6 Kegiatan Prioritas BPS Kota Palembang Tahun 2020**

#### **3.6.1. Sensus Penduduk 2020**

Kegiatan pengumpulan data SP2020 dilakukan dengan metode kombinasi, yaitu memanfaatkan data adminduk dari Ditjen Dukcapil sebagai data dasar untuk kegiatan pencacahan penduduk secara lengkap. Pada awalnya, kegiatan SP-Online dijadwalkan pada Bulan Februari – Maret 2020 dan pencacahan lapangan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2020. Akan tetapi, kondisi darurat pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, mulai Maret 2020 yang lalu mendorong banyak kantor statistik nasional (*National Statistics Office – NSO*) di berbagai belahan dunia untuk melakukan penyesuaian tata kelola penyelenggaraan Sensus Penduduk di tahun 2020, termasuk juga BPS.

Perubahan tata kelola meliputi penyesuaian proses bisnis, perubahan jadwal, perubahan metode pelatihan, perubahan organisasi lapangan, penyesuaian metode dan instrumen kegiatan, serta penyesuaian petugas lapangan. Tentu saja penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap berpedoman pada tujuan SP2020.

Akibat dari adanya penyesuaian tata kelola SP2020, maka pelaksanaan SP online dilaksanakan pada bulan Februari-Mei 2020 dan pelaksanaan lapangan SP2020 pada bulan September 2020 secara door to door dengan penyesuaian pada metode dan instrumen kegiatan serta jumlah petugas lapangan.

Sosialisasi Sensus Penduduk Online (SP Online) oleh BPS Kota Palembang dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari kunjungan ke organisasi perangkat daerah (OPD), *BPS Goes to School*, talkshow di radio, iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan televisi lokal, rapat teknis internal, rapat koordinasi kampus, sosialisasi oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPS Kota Palembang, Ngisi Bareng (Ngibar) SP Online, hingga pemasangan berbagai media publikasi seperti banner, spanduk, poster, dsb di berbagai titik keramaian di Kota Palembang.

Gambar 15. Talk Show di Lanugraha 105 FM



Sosialisasi SP Online dimulai sejak November 2019 dan terus berlangsung hingga Mei 2020. Sosialisasi mulai dilakukan sebelum pelaksanaan SP Online (Oktober 2019 s.d Januari 2020) hingga saat pelaksanaan SP Online (Februari s.d Mei 2020). Sosialisasi SP Online dilakukan oleh semua karyawan/ti BPS Kota Palembang, dibantu dengan agen SP yang merupakan mitra BPS Kota Palembang, duta sensus di beberapa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, serta dengan dukungan dari pemerintah daerah dan perangkatnya.

### Pelaksanaan Lapangan

Rekrutmen petugas dilaksanakan secara *close recruitment* dengan cara berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta rekrutmen melalui database mitra BPS Kota Palembang (SIMRAPOR). Jumlah Petugas Sensus di Kota Palembang sebanyak 879 orang dan koseka 67 orang.

Dengan kondisi pandemi COVID19 yang masih berlangsung di Indonesia mengakibatkan proses pelatihan petugas tidak dapat dilaksanakan langsung secara tatap muka. Sehingga

pelatihan petugas SP2020 September 2020 dilakukan melalui 2 moda, yaitu *e-learning* dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui Aplikasi *Zoom Meeting*, dan pembelajaran secara mandiri. PJJ melalui *e-learning* dan aplikasi *zoom meeting* digunakan untuk pelatihan bagi Koseka. Sedangkan, pelatihan PS dilakukan dengan pembelajaran mandiri melalui TVRI, RRI, dan Youtube.

Kegiatan lapangan Sensus Penduduk dilaksanakan pada tanggal 1- 30 September 2020. Terkait dengan SP2020, berdasarkan surat Kepala BPS B-233/BPS/4000/08/2020, setiap pegawai BPS akan melaksanakan program Satu Pegawai Satu SLS (SPSS). Program SPSS bertujuan untuk mengawal kualitas data dalam SP2020-DP2 dan untuk memastikan tidak ada penduduk yang lewat cacah. Setiap pegawai BPS diminta agar mendampingi PS pada saat pemeriksaan SP2020 DP2 bersama Ketua SLS atau pendamping yang ditunjuk minimal SLS terkecil pada lingkungan sekitar tempat tinggal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.

Terdapat kelompok penduduk lain, seperti tunawisma dan awak kapal berbendera Indonesia, yang akan dicatat oleh *Task Force* pada hari Sensus, yaitu tanggal 15 September 2020 atau *Census Night*. Khusus untuk BPS Kota Palembang, penelusuran penduduk pada *census night* dilakukan dengan bantuan tim *Task Force* dari BPS Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kelancaran kegiatan SP2020 bulan September 2020, BPS Kota Palembang melakukan supervisi kegiatan SP2020 bulan September ke wilayah kecamatan/kelurahan di seluruh Kota Palembang, diantaranya :

- a. Supervisi Kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) Sensus Penduduk September 2020
- b. Supervisi *Revisit Dugaan Under Coverage* SP September 2020

Hasil SP *Online* dan *door to door* Kota Palembang mencapai angka 98.689 keluarga sampai dengan Mei 2020. Hasil tersebut mencakup sekitar 19,99 persen dari total keluarga di Palembang. Ini berarti sekitar 27,62 persen dari total penduduk Kota Palembang (dari 1,61 juta jiwa) telah mengisi SP *Online*. Berdasarkan Daftar Penduduk (DP) hasil SP *Online* dan data dukcapil, selanjutnya dilakukan pendataan lapangan.

Hasil pendataan lapangan SP2020 pada Bulan September, diketahui bahwa total penduduk Kota Palembang pada Tahun 2020 adalah sebesar 1.668.848 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Adapun untuk hasil Sensus Penduduk lapangan, disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 15. Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Kelompok Umur Hasil Sensus Penduduk 2020**

Kelompok Umur (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
0-4	81.645	77.482	159.127
5-9	77.809	74.118	151.927
10-14	65.236	61.548	126.784
15-19	64.506	61.689	126.195
20-24	70.913	68.703	139.616
25-29	72.603	69.414	142.017
30-34	69.949	67.488	137.437
35-39	66.538	64.417	130.955
40-44	58.957	57.957	116.914
45-49	51.932	54.123	106.055
50-54	45.060	47.881	92.941
55-59	37.294	40.674	77.968
Kelompok Umur (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
60-64	30.573	32.887	63.460
65-69	22.397	24.170	46.567
70-74	11.702	13.911	25.613
75+	9.917	15.355	25.272
<b>Total</b>	<b>837031</b>	<b>831817</b>	<b>1668848</b>

Terdapat perbedaan hasil SP2020 bulan September dengan hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015 kondisi September 2020. Oleh karena itu, dilakukan *revisit under coverage* sebagai tindak lanjut hasil SP2020 bulan September. *Revisit under coverage* yang dilakukan oleh kabupaten/ kota harus mampu menjelaskan hasil yang didapatkan. Penjelasan tersebut harus disertai dengan fenomena fenomena yang mendukung dan sesuai kondisi lapangan. Fenomena-fenomena tersebut diantaranya:

1. Penduduk turun karena pembelajaran jarak jauh di masa pandemi;
2. Pusat pembelajaran tutup;
3. Industri tutup;
4. Keberhasilan program KB;
5. Perluasan sentra industri hingga daerah penyangga;
6. Penduduk merantau ke Jabodetabek (bekerja & sekolah);
7. Pencatatan santri kurang dari 18 tahun di keluarga masing-masing;
8. Pembangunan sarana prasarana;
9. Pengusaha warteg, nasi goreng, ketoprak di Jakarta;
10. Lonjakan penduduk rantau yang pulang akibat pandemi di tingkat kecamatan.

Saran yang diberikan kepada penyelenggaraan kegiatan SP2020 diantaranya :

1. Pengelolaan *database* mitra yang baik (terutama dari hasil SP2020), untuk mendapatkan mitra berkualitas untuk kegiatan BPS lain di masa datang.
2. Pemanfaatan data-data pembanding, seperti data hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015, *database* kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta data penduduk (sementara) dari hasil Kawal Sensus. Data pembanding tersebut dapat digunakan untuk pencermatan awal hasil SP2020.
3. Memanfaatkan sistem yang telah dipersiapkan oleh BPS Kota Palembang dengan sebaik-baiknya untuk mengawal kualitas data SP2020 (Kawal Sensus).
4. Persiapan yang baik dan terencana berkaitan dengan kegiatan SP2020 lanjutan pada tahun 2021.

### 3.6.2. Pemutakhiran Perkembangan Data Desa

Tujuan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan wilayah. Memberikan data tentang potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Sedangkan tujuan dari Pemutakhiran data Perkembangan Desa adalah :

1. Menyediakan data dasar untuk menghitung Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasian Dana Desa (DD).
2. Menyediakan data untuk menghitung Indeks desa (ID)
3. Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah.
4. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi.
5. Menyediakan data dukung untuk penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA)

Sumber informasi Pemutakhiran Data Perkembangan Desa diperoleh dari narasumber terkait dan relevan di wilayah desa/kelurahan. Narasumber tersebut adalah aparatur pemerintah desa/ kelurahan yang terdiri dari kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/kelurahan (sekretaris desa, sekretariat, pelaksana kewilayahan, dan perangkat teknis) serta narasumber lain yang berwenang dan relevan. Langkah yang bisa ditempuh untuk menghasilkan data yang berkualitas antara lain:

1. Wawancara dengan beberapa aparatur pemerintah desa/kelurahan,
2. Wawancara dengan narasumber lain yang berwenang dan relevan,
3. Konfirmasi kembali kepada aparatur pemerintah desa setelah mendapatkan data dari narasumber lain yang terkait dan relevan.

Usaha lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pencacah dalam menjalin komunikasi yang baik dengan semua narasumber. Narasumber harus dijadikan sebagai mitra diskusi sekaligus sebagai narasumber untuk menggali data secara bersama-sama. Pelaksanaan *updating* PODES 2020 ini menggunakan metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*). Wawancara CAPI dilakukan dengan bantuan *device portable (tablet/smartphone)* dengan metode BYOD (*Bring Your Own Device*), artinya perangkat yang digunakan untuk kegiatan pencacahan disediakan sendiri oleh petugas

BPS Kota Palembang melibatkan 20 petugas untuk melaksanakan pendataan *updating* PODES 2020, yang terdiri dari 17 orang PCL yang merupakan Koordinator Statistik Kecamatan dan tiga orang Staf BPS Kota Palembang yang bertugas sebagai PML

Kegiatan *Updating* Podes 2020 tidak ada pelatihan baik ditingkat pusat maupun daerah, yang menjadi petugas adalah yang pernah menjadi petugas podes sebelumnya. Untuk memahami mekanisme lapangan, BPS Pusat membuat *E-learning* yang berisi materi yang diperlukan sebagai panduan dan tata cara instalasi program CAPI *Updating* Podes 2020 yang diakses melalui web : [s.bps.go.id/podes2020](http://s.bps.go.id/podes2020)

Pencacahan lapangan *updating* PODES 2020 dilaksanakan pada tanggal 15 Juni – 17 Juli 2020. Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi ICS adalah mengunduh aplikasi ICS terlebih dahulu. Setelah berhasil diunduh, melakukan *install* aplikasi ICS pada perangkat *tablet/smartphone* masing-masing petugas. Untuk memeriksa hasil pencacahan *updating* PODES 2020 menggunakan web monitoring dengan alamat <http://ics.bps.go.id>



Gambar 16. Supervisi dan Pencacahan Podes

Tabel 16 Hasil Pendataan Hasil Updating Podes 2020 Kota Palembang

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	
	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)
1 Ilir Barat II	7	7
2 Gandus	5	5
3 Seberang Ulu I	5	5
4 Jakabaring	5	5
5 Kertapati	6	6
6 Seberang Ulu II	7	7
7 Plaju	7	7
8 Ilir Barat I	6	6
9 Bukit Kecil	6	6
10 Ilir Timur I	11	11
11 Kemuning	6	6
12 Ilir Timur II	6	6
13 Ilir Timur III	6	6
14 Kalidoni	5	5
15 Sako	4	4
16 Sematang Borang	4	4
17 Sukarami	7	7
18 Alang-Alang Lebar	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pencacahan didapatkan permasalahan yang ditemui dan dilakukan pemecahan masalahnya seperti terlihat di tabel berikut :

Permasalahan :

1. Aparat Kelurahan yang mengetahui data tidak ada ditempat saat pencacahan
2. Arsip di kantor Kelurahan tidak lengkap
3. Isian kuesioner PODES 2020 tidak konsisten dengan isian PODES 2019

Pemecahan :

1. Melakukan kunjungan ulang dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui telepon melakukan janji untuk bertemu
2. Mencari data pendukung didinas terkait
3. Melakukan pengecekan ulang dilapangan

### **3.6.3. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2020**

Pendataan Statistik Tanaman Pangan terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area adalah suatu metode baru yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan BPS dalam rangka memperbaiki metode pengumpulan data luas panen yang didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Metode ini dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan modern dengan melibatkan perangkat teknologi didalamnya. Sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Tujuan dari Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2020 sebagai berikut :

1. Memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih obyektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu;
2. Merupakan tindak lanjut pengembangan dan perbaikan dari kegiatan uji coba sebelumnya yakni Uji Coba Kerangka Sampel Area (KSA) di Kabupaten Indramayu dan Garut pada tahun 2015, dan kegiatan pengumpulan data statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode kerangka sampel area (KSA) di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta di tahun 2017.

Periode pelaksanaan pengambilan data lapangan adalah 7 hari terakhir setiap bulan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Fase tumbuh tanam padi, luas panen, luas vegetatif, dan luas generatif padi dan jagung. Adapun manfaat yang bisa diperoleh pengguna data dari hasil kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area, yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional;

2. Mengetahui informasi pendukung lainnya, yaitu : luas panen, luas tanam, luas vegetatif, luas generatif dan fase tumbuh tanam padi dan jagung.

Tahapan yang harus dilalui oleh PCS dalam pelaksanaan Survei KSA adalah :

1. Kegiatan pengamatan fase tumpuh padi dan jagung dengan metode Kerangka Sampel Area dimulai dengan melakukan persiapan sebelum menuju lokasi pengamatan
2. Pada tahap persiapan petugas pencacah berkoordinasi dengan pengawas terkait jumlah beban tugas dan lokasi pengamatan
3. Memastikan segmen yang akan dikunjungi petugas adalah segmen yang ditugaskan untuk periode pengamatan tersebut
4. Petugas pengawas memberikan arahan kepada pencacah letak geografis dari lokasi pengamatan fase tumbuh padi dan jagung berdasarkan daftar sampel segmen
5. Melihat posisi segmen pada aplikasi Survei KSA yang menjadi tanggung jawabnya
6. Menentukan jalan terbaik menuju ke lokasi segmen
7. Melakukan observasi pada 9 titik pengamatan di setiap segmen
8. Melakukan perekaman data di setiap segmen
9. Melakukan pengiriman data dengan menekan tombol kirim

Target alokasi segmen untuk KSA Padi Kota Palembang adalah sebanyak 25 segmen per bulan atau 300 segmen selama tahun 2020 (januari s.d. desember) dan seluruhnya teralisasi. Target alokasi segmen untuk KSA Jagung Kota Palembang sebanyak 16 segmen per bulan atau 144 segmen selama tahun 2020 (Januari s.d. Desember).

Permasalahan :

1. Kesulitan untuk menuju lokasi segmen yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak mendukung seperti hujan dan geografis yang sulit dijangkau

Solusi :

3. Penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung

perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional;

4. Mengetahui informasi pendukung lainnya, yaitu : luas panen, luas tanam, luas vegetatif, luas generatif dan fase tumbuh tanam padi dan jagung.

Tahapan yang harus dilalui oleh PCS dalam pelaksanaan Survei KSA adalah :

1. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kegiatan pengamatan fase tumpuh padi dan jagung dengan metode Kerangka Sampel Area dimulai dengan melakukan persiapan sebelum menuju lokasi pengamatan
2. Pada tahap persiapan petugas pencacah berkoordinasi dengan pengawas terkait jumlah beban tugas dan lokasi pengamatan
3. Memastikan segmen yang akan dikunjungi petugas adalah segmen yang ditugaskan untuk periode pengamatan tersebut
4. Petugas pengawas memberikan arahan kepada pencacah letak geografis dari lokasi pengamatan fase tumbuh padi dan jagung berdasarkan daftar sampel segmen
5. Melihat posisi segmen pada aplikasi Survei KSA yang menjadi tanggung jawabnya
6. Menentukan jalan terbaik menuju ke lokasi segmen
7. Melakukan observasi pada 9 titik pengamatan di setiap segmen
8. Melakukan perekaman data di setiap segmen
9. Melakukan pengiriman data dengan menekan tombol kirim

Target alokasi segmen untuk KSA Padi Kota Palembang adalah sebanyak 25 segmen per bulan atau 300 segmen selama tahun 2020 (januari s.d. desember) dan seluruhnya teralisasi. Target alokasi segmen untuk KSA Jagung Kota Palembang sebanyak 16 segmen per bulan atau 144 segmen selama tahun 2020 (Januari s.d. Desember).

Permasalahan :

1. Kesulitan untuk menuju lokasi segmen yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak mendukung seperti hujan dan geografis yang sulit dijangkau

Solusi :

1. Kedepan petugas sebaiknya dibekali dengan asuransi jiwa mengingat lokasi segmen yang berbahaya dan mengancam jiwa

#### 3.6.4. Survei Ubinan Tanaman Pangan

Mengingat pentingnya peran subsector tanaman pangan, dibutuhkan informasi mengenai produksi tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi penting adalah hasil per hektar (produktivitas) yang dikumpulkan secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan Tanaman Pangan.

Tujuan dari pelaksanaan Survei Ubinan tanaman pangan adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (pad idanpalawija);
2. Memperoleh informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubinan, cara penanaman, system penanaman jajar legowo (khusus padi), penggunaan pupuk penanggulangan OPT, danlain-lain.

Periode pelaksanaan survey ubinan tanaman pangan tahun 2020 terbagi sebagai berikut :

Subround	Pemutakhiran Rumah Tangga
Januari-April (I)	Desember (2019)
Mei-Agustus (II)	April (2020)
September-Desember (III)	Agustus (2020)

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Angka Produktivitas Padi dan Palawija yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan melalui hasil rapat pertemuan Angka Tetap (ATAP).

Adapun manfaat yang bisa diperoleh pengguna data dari hasil kegiatan Survei Ubinan Tanaman Pangan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui data produktivitas (hasil per hektar) tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubijalar;
2. Mengetahui informasi pendukung lainnya, yaitu : koordinat lokasi ubinan, jenis laham, cara penanaman, system penanaman jajar legowo (khusus padi), jenis kegiatan peningkatan produksi, banyaknya benih yang digunakan jenis varietas benih yang digunakan (khusus padi dan jagung), banyaknya pupuk yang digunakan, informasi cara pengendalian terkena serangan hama/OPT, informasi bantuan benih, pupuk, alsintan, dan informasi kualitatif terkait produktivitas

Permasalahan :

1. Untuk Subround II Tanaman Padi tidak terealisasi 0 plot, karena pada saat Subround II tidak ada panen karena bergesernya musim tanam dan panen pada umumnya dimulai bulan September, sedangkan september sudah masuk subround III sedangkan untuk beberapa tanaman palawija seperti jagung dan kacang tanah disebabkan tidak ada rumah tangga yang menanam tanaman tersebut. Untuk Ubinan padi pada umumnya system pemanenannya sudah memakai alsintan seperti *combine harvest* oleh karena itu petugas ubinan harus memantau kapan panen setiap plot dan meminta *contact person* masing masing petani agar mudah memantaunya

Solusi :

1. Kedepan dapat melakukan koordinasi intensif dengan responden sehingga Jadwal panen dapat dipantau

### 3.7 Upaya Efisiensi di BPS Kota Palembang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik . “SAKIP mengarahkan birokrasi agar menetapkan program dan kegiatan

berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan. Efisiensi perlu dilakukan sehingga program yang berjalan tepat sasaran. BPS Kota Palembang telah berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan cara seminimal mungkin dalam penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang maksimal.

Sesuai dengan aplikasi smart, efisiensi yang telah dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang sebesar 1,37. Pengukuran efisiensi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Pengukuran tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 pengukuran efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^N ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^N ((PAKi \times CKi))} \times 100\%$$

E : Efisiensi  
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i  
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i  
 CKi : Capaian keluaran i

Efisiensi yang telah dilaksanakan BPS Kota Palembang atas aspek implementasi sesuai dengan tujuan dan sasaran seperti terlihat pada Tabel 17:

Tabel 17. Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	110	98,54	1,46
	1.1 Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	110	98,54	1,46
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	100	0	100
	2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	100	0	100
3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	100	90,63	9,37
	3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	100	90,63	9,37
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	101,54	98,75	1,25
	4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	101,54	98,75	1,25
	Rata-Rata	102,88	98,62	1,37

Pada Tujuan Pertama “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” penyerapan anggaran sebesar 98,54 persen terdapat efisiensi sebesar 1,46 persen dengan nilai capaian kinerja 110 persen. Tujuan kedua “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” yaitu pengumpulan survei kebutuhan data dan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus telah selesai dilakukan. Dalam pelaksanaannya karena pandemi covid19, maka pengumpulan survei kebutuhan data dan metadata sektoral khusus tidak melalui perjalanan dinas tetapi melalui pengunjung yang datang ke PST BPS Kota Palembang, melalui link online dan telepon sehingga uang harian perjalanan dinas tidak terserap mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi nihil.

Penyerapan anggaran tujuan ketiga “Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN “ yaitu sebesar 90,63 dengan capaian kinerja 100 persen dan efisiensi sebesar 9,37 persen. Sedangkan penyerapan pada tujuan ke empat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” sebesar 98,75 persen dengan capaian kinerja 101,54 persen dan efisiensi 1,25 persen.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah–rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah dan biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. BPS Kota Palembang sebelum terbitnya peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 masih terdiri dari 6 seksi. Tiap seksi telah bekerja secara efisien. Efisiensi BPS Kota Palembang perseksi dapat dilihat pada Tabel 15) . Neraca Wilayah Analisis Statistik dapat melaksanakan capaian kinerja dengan cara paling efisien dan efektif dibanding seksi yang lain, dengan nilai efisiensi sebesar 0,08.

Tabel 18. Efisiensi per Unit Kerja BPS Kota Palembang Tahun 2020

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Efisiensi
1	Subbagian Umum	5.649.132.000	5.578.314.194	1,25
2	Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	32.030.000	32.003.000	0,08
3	IPDS	41.988.000	36.522.000	13,01
4	Produksi	226.416.000	210.053.000	7,23
5	Sosial	3.917.451.000	3.870.866.815	1,19
6	Disribusi	302.098.000	300.978.300	0,37
<b>Total</b>		<b>10.169.115.000</b>	<b>10.028.737.309</b>	<b>1,38</b>

Salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dalam menanggulangi pandemi adalah dengan melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian/lembaga untuk tahun 2020. Dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, pemerintah terus menerapkan berbagai upaya, salah satunya *physical distancing* dengan menerapkan kebijakan *work from home* (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini tentu saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyerapan anggaran yang kurang maksimal. Data yang dihimpun oleh Subbagian Umum menunjukkan penurunan realisasi anggaran khususnya belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja bahan, belanja honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya. Salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dalam menanggulangi pandemi ini adalah dengan melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian/lembaga untuk tahun 2020. Pada triwulan kedua BPS Kota Palembang telah melakukan efisiensi pada kegiatan paket meeting, pengawasan kabupaten/kota dan pencetakan publikasi dalam rangka percepatan penanggulangan penanganan covid19, efisiensi tersebut pada kegiatan :

1. Focus Grup Discussion Daerah Dalam Angka sebesar Rp. 15.840.000,- dengan akun 524114
2. Pelatihan petugas survei neraca Pengeluaran sebesar Rp. 1.380.000,- dengan akun 521211
3. Pelatihan Sakernas Tahunan sebesar Rp. 42.560.000,- dengan akun 524114
4. Pelatihan petugas Susenas Panel sebesar Rp. 46.396.000,- dengan akun 524114
5. Pelaksanaan Lapangan pendataan short form SP2020 sebesar Rp. 12.173.151.000,- dengan akun :

521211 sebesar	Rp. 418.600.000,-
521213 sebesar	Rp. 8.788.511.000,-
521219 sebesar	Rp. 115.559.000,-
524113 sebesar	Rp. 1.108.430.000,-
524114 sebesar	Rp. 1.742.051.000,[-

Untuk penanggulangan covid19 , kegiatan pelatihan dilakukan secara online (tanpa tatap muka) sehingga dialihkan untuk biaya pulsa , APD (Alat Pelindung Diri) dan Rapid test petugas.

Sesuai dengan realisasi anggaran tahun 2020 dan 2019 bahwa terlihat penghematan pada belanja pemeliharaan , belanja perjalanan dalam negeri dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin tahun 2020 turun sebesar 5,92 persen. Efisiensi terjadi pada genset, pemeliharaan PC/notebook/laptop/server, bahan bakar genset, pemeliharaan UPS, mesin handkey dan pemeliharaan BMN lainnya.
- Penurunan Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 36,53 persen.
- Belanja perjalanan dinas meeting dalam kota terdapat penurunan sebesar 79,03 persen. Efisiensi pada perjalanan dinas pelatihan Sensus Penduduk, Focus Grup Discussion Daerah Dalam Angka , Sakernas tahunan, Susenas Panel.
- Belanja perjalanan biasa terjadi penurunan 19,46 persen
- Belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja)) menurun sebesar 6,89 persen .Penurunan tunjangan kinerja tersebut dikarenakan tunjangan hari raya (THR) dan Tunjangan Kinerja ke – tiga belas tahun 2020 batal dibayarkan ke pegawai.
- Belanja bahan mengalami penurunan 36,85 persen
- Selain itu pemanfaatan sumber energi seperti listrik dan air tetap digunakan secara efisien. Mematikan penggunaan listrik setelah menyelesaikan pekerjaan dan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan.

Realisasi anggaran tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 19.

**Tabel 19. Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019**

Akun	Nama Akun	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik/ Turun (%)
521211	Belanja Bahan	212.889.150	337.124.000	(36,85)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.229.600.772	2.394.584.286	(6,89)
522111	Biaya Listrik	50.972.789	62.309.256	(18,19)
522113	Biaya Langganan air	2.047.610	2.512.866	(18,51)

523111	Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan	34.530.000	54.407.200	(36,53)
523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin	133.939.080	142.367.510	(5,92)
524111	Belanja perjalanan biasa	1.200.000	1.490.000	(19,46)
524114	Belanja perjalanan dinas meeting dalam kota	161.200.000	768.555.000	(79,03)

### 3.7. Kinerja Anggaran Tahun 2020

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2020 mencapai 98,62 persen dengan capaian kinerja 102,80 persen, dengan rincian yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas –tugas Lainnya BPS menyerap anggaran sebesar 98,75 persen terhadap total pagu dengan capaian kinerja 101,54 persen, dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik menyerap dana sebesar 98,46 persen terhadap total pagu dengan capaian kinerja 103,33. Adapun realisasi penggunaan anggaran BPS Kota Palembang selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Penyerapan Anggaran dan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Dirinci Menurut Program

Program	Pagu 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.649.132.000	5.578.314.194	101,54	98,75
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	4.519.983.000	4.450.423.115	103,33	98,46
<b>Total</b>	<b>10.169.115.000</b>	<b>10.028.737.309</b>	<b>102,88</b>	<b>98,62</b>

Penyerapan anggaran tertinggi di BPS Kota Palembang pada seksi Neraca Wilayah dan analisis statistik dengan penyerapan anggaran 99,92 persen dengan capaian kinerja 103,80 persen. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada seksi IPDS hanya menggunakan anggaran 86,98 persen dengan capaian kinerja 103,63 persen. Terdapat anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan, dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak melalui perjalanan dinas

tetapi melalui telepon, link online dan pengunjung yang datang ke PST BPS Kota Palembang. Penyerapan anggaran dan capaian kinerja per unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Penyerapan Anggaran dan Capaian Kinerja Per Unit Kerja BPS Kota Palembang Tahun 2020

Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Subbagian Umum	5.649.132.000	5.578.314.194	101,29	98,75
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	32.030.000	32.003.000	103,80	99,92
IPDS	41.988.000	36.522.000	103,63	86,98
Produksi	226.416.000	210.053.000	113,02	92,77
Sosial	3.917.451.000	3.870.866.815	100,08	98,81
Disribusi	302.098.000	300.978.300	104,51	99,63
<b>Total</b>	<b>10.169.115.000</b>	<b>10.028.737.309</b>	<b>102,88</b>	<b>98,62</b>

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Capaian dan Penyerapan anggaran BPS Kota Palembang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 22. Penyerapan Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2020 Berdasarkan Tujuan dan sasaran

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja (%)	Pagu 2020	Realisasi 2020	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)
01-	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		110,00	4.499.723.000	4.433.883.115	98,54
	1.1-Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas		110,00	4.499.723.000	4.433.883.115	98,54
		2895-Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi		4.499.723.000	4.433.883.115	98,54

	Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran Nasional Dan Regional Yang Dapat Digunakan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan		26.037.000	26.010.000	99,90
	Publikasi/Laporan Neraca Produksi		5.993.000	5.993.000	100,00
	Dokumen, Laporan, Dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei		21.728.000	19.982.000	91,96
	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi Yang Terbit Tepat Waktu		10.012.000	9.950.000	99,38
	Publikasi/Laporan Penyusunan Statistik Perdagangan Antar Wilayah Komoditi Tertentu		10.960.000	10.960.000	100,00
	Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar Dan Pusat Perdagangan		750.000	750.000	100,00
	Publikasi/Laporan Statistik Harga		189.505.000	188.899.300	99,68
	Publikasi/Laporan Statistik Harga Konstruksi		9.570.000	9.325.000	97,44
	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi		105.103.000	100.510.000	95,63
	Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan		153.520.000	152.307.100	99,21
	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk		3.422.464.000	3.379.150.715	98,73
	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Terbit Tepat Waktu		301.679.000	300.842.000	99,72
	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial		8.420.000	8.205.000	97,45
	Publikasi/Laporan Pendataan Podes		31.368.000	30.362.000	96,79
	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata Yang Terbit Tepat Waktu		78.215.000	78.099.000	99,85
	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah		3.086.000	2.995.000	97,05
	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Terbit Tepat Waktu		7.903.000	6.300.000	79,72
	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan		35.427.000	31.518.000	88,97
	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan		14.947.000	13.050.000	87,31
	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area		63.036.000	58.675.000	93,08
02-Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN		100,00	2.010.000	-	0,00
2.1-Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN		100,00	2.010.000	-	0,00

	2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik		2.010.000	-	0,00
	Sistem Metadata Yang Dikembangkan		2.010.000	0	0,00
03-Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		100,00	18.250.000	16.540.000	90,63
3.1-Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I		100,00	18.250.000	16.540.000	90,63
	2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik		18.250.000	16.540.000	90,63
	Sistem Pendukung Layanan Untuk Diseminasi Data Dan Informasi Statistik Yang Dikembangkan Dan Dipelihara		18.250.000	16.540.000	90,63
04-Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		101,54	5.649.132.000	5.578.314.194	98,75
4.1-SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		101,54	5.649.132.000	5.578.314.194	98,75
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi		5.649.132.000	5.578.314.194	98,75
	Layanan Dukungan Manajemen Satker		9.600.000	9.600.000	100,00
	Layanan Perkantoran		5.636.037.000	5.565.219.194	98,74
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		3.495.000	3.495.000	100,00
	<b>Total</b>	<b>102,8</b>	<b>10.169.115.000</b>	<b>10.028.737.309</b>	<b>98,61957</b>

Realisasi anggaran yang tersedia pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 10.169.115.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.028.737.309,- dengan penyerapan anggaran sebesar 98,62 persen, bahwa dalam mencapai :

1. Tujuan pertama “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan anggaran Rp. 4.499.723.000,- berhasil menyerap anggaran 98,54 persen dengan realisasi Rp. 4.433.883.115,- dan capaian kinerja 110 persen.
2. Tujuan kedua Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan anggaran Rp. 2.010.000,- menyerap anggaran Rp. 0,- persen dengan realisasi capaian kinerja 100 persen.
3. Tujuan ketiga Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I dengan anggaran Rp. 18.250.000,-

menyerap anggaran 90,63 persen dengan realisasi Rp. 16.540.000,- dan capaian kinerja 100 persen

4. Tujuan ke empat SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan sasaran SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan anggaran Rp. 5.649.132.000,- menyerap anggaran 98,75 persen dengan realisasi Rp. 5.355.204.301,- dan capaian kinerja 113,02 persen.

Tujuan keempat Peningkatan birokrasi yang akuntabel dengan sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS dengan anggaran Rp. 5.578.314.194,- menyerap anggaran 98,75 persen dengan realisasi Rp. 5.578.314.194,- dan capaian kinerja 101,54 persen.

Keterkaitan dan keselarasan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran akan dicapai secara efisien dan efektivitas dalam pengalokasian anggaran apabila penyerapan anggaran telah sesuai dengan rencana penarikan dana. Konsistensi penyerapan anggaran di BPS Kota Palembang telah dilaksanakan secara baik. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Konsistensi penyerapan anggaran BPS Kota Palembang diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^N \left( \frac{\text{RPDKn} - (\text{RPDKn} - \text{RAKn})}{\text{RPDKn}} \right)}{N} \times 100\%$$

- K = Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan  
 RAK = Realisasi Anggaran kumulatif sampai dengan bulan i  
 RPDK = Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n  
 n = Jumlah bulan

Tingkat konsistensi untuk setiap bulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Konsistensi rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran Tahun 2020 dan 2019

Bulan	Tahun 2020			Tahun 2019		
	Rencana Penarikan Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Konsistensi Per Bulan	Rencana Penarikan Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Konsistensi Per Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	341.811.323	341.602.655	99,94	333.899.000	332.789.596	99,67
Februari	508.370.698	509.517.344	99,89	826.750.000	826.751.488	99,99
Maret	632.187.212	669.472.707	97,42	520.727.000	520.728.278	99,99
April	459.187.659	463.206.747	97,82	1.098.610.000	1.098.608.700	99,99
Mei	868.648.824	873.974.692	98,31	2.094.185.000	2.094.186.009	99,99
Juni	495.620.719	510.873.560	98,10	413.615.000	413.616.448	99,99
Juli	440.189.809	442.410.725	98,26	863.436.000	863.437.705	99,99
Agustus	660.119.487	661.340.980	98,50	533.040.000	533.040.918	99,99
September	743.273.934	797.421.477	97,66	493.488.000	493.488.400	99,99
Oktober	2.928.312.501	2.938.875.659	98,38	677.540.000	677.540.756	99,99
November	622.439.923	550.669.233	99,32	698.075.000	659.276.826	94,44
Desember	1.468.952.911	1.269.371.530	98,62	683.753.000	530.938.477	77,65
<b>Total</b>	<b>10.169.115.000</b>	<b>10.028.737.309</b>	<b>98,52</b>	<b>9.237.118.000</b>	<b>9.044.403.601</b>	<b>97,64</b>

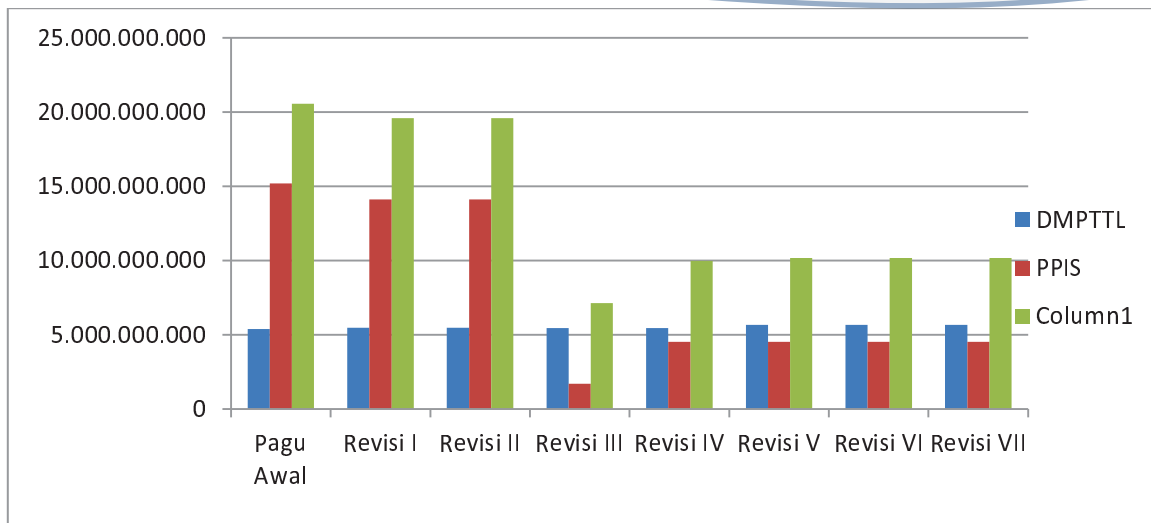
Penyerapan anggaran BPS Kota Palembang seiring dengan rencana penarikan dana. Pada tahun 2020 nilai konsistensi sebesar 98,52 persen lebih baik daripada tahun 2019 sebesar 97,64 persen. BPS Kota Palembang telah berusaha untuk menyelaraskan antara rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran, namun masih terdapat inkonsistensi. Ketidakkonsistenan tersebut diakibatkan pandemi covid19 mengakibatkan beberapa perjalanan dinas tidak dapat direalisasikan, terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan di BPS Kota seperti

entri data perusahaan konstruksi dan penginapan peserta Ratekda yang tidak dapat dicairkan karena pelaksanaannya secara fullday.

Pada Tahun 2020 BPS Kota Palembang telah melakukan revisi DIPA (dengan pengesahan DJPB) sebanyak 7 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi DIPA Pertama disebabkan karena adanya penghapusan anggaran Statistik Wisatawan Nusantara , dengan DIPA awal sebesar Rp. 20.550.154.000, menjadi 19.575.136.000,-
2. Revisi DIPA kedua dikarenakan adanya penyesuaian rencana penarikan halaman 3 DIPA sehingga tidak terdapat perubahan anggaran
3. Revisi ketiga karena adanya penghematan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 sehingga anggaran berubah dari Rp. 19.575.136.000, - menjadi Rp. 7.135.124.000,-
4. Revisi ke empat karena adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 sehingga anggaran bertambah dari Rp. 7.135.124.000,- menjadi Rp. 9.969.867.000,-
5. Revisi ke lima karena adanya penambahan anggaran gaji dan tunjangan kinerja sehingga anggaran bertambah dari Rp. 9.969.867.000,- menjadi Rp. 10.169.115.000,-
6. Revisi ke enam untuk menutupi pagu minus gaji, kegiatan rapat teknis BPS se Sumatera Selatan, perubahan pejabat PPSPM (revisi administrasi) dan penyesuaian rencana penarikan halaman 3 DIPA. Revisi yang dilakukan tidak menambah anggaran.
7. Revisi ke tujuh untuk penyesuaian rencana penarikan halaman 3 DIPA dan penambahan anggaran akun covid 19 sehingga hanya terjadi pergeseran POK.

Gambar 17. Revisi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Tinjauan Umum**

BPS Kota Palembang sejalan dengan keinginan reformasi birokrasi telah berusaha untuk menghasilkan data yang terpercaya, beragam dan berkualitas. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap data BPS. Data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan karena merupakan rujukan bagi semua pihak dalam memformulasikan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi berbagai program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja BPS Kota Palembang menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Kesimpulan ini tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Palembang Tahun 2020. Selain itu BPS Kota Palembang selama tahun 2020 mendapatkan penghargaan dari BPS sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal tersebut merupakan salah satu target program Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rata-rata capaian kinerja BPS Kota Palembang menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai capaian kinerja sebesar 102,80 persen. Target dari seluruh tujuan dapat tercapai. Capaian tujuan pertama "Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" yaitu sebesar 110 persen, tujuan kedua "Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN" yaitu 100 persen, tujuan ketiga "Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN" yaitu sebesar 100 persen dan tujuan keempat "Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi" yaitu sebesar 101,54 persen. Penyebab keberhasilan kinerja ini sebagai berikut :

1. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
3. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2020.
4. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

#### **4.2. Tindak Lanjut**

Pada tahun 2020 semua target sasaran strategis telah berhasil dicapai oleh BPS Kota Palembang. Jika dibandingkan dengan target renstra 2020 - 2024 akhir , nilai capaian kinerja BPS Kota Palembang hanya sebesar 67,38 persen, sehingga BPS Kota Palembang harus bekerja lebih maksimal agar capaian kinerja dapat dipertahankan. Langkah-langkah yang perlu diambil BPS Kota Palembang yaitu tetap terus melaksanakan sosialisasi ke K/L/D/I tentang penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kementerian/lembaga/satuan perangkat daerah/instansi lainnya lebih mengerti dan memahami tentang kaidah-kaidah penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan lebih mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi Romantik Online

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Renstra BPS Kota Palembang 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	58,28	60,00	62,50	65,00	67,50	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NWAS, Bidang IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	3,85	3,85	7,69	11,54	11,54	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NWAS
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	33,33	33,33	33,33	50	50	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NWAS, Bidang IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	10	12,5	15	17,5	20	Seksi IPDS
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	2,5	5	7,5	10	12,5	Seksi Sosial Produksi distribusi dan NWAS IPDS
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	69	70	71	72	73	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NWAS, Bidang IPDS
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	88,51	89,50	90,50	91,05	92,00	Seksi IPDS

**Lampiran 2**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Taupiq Hidayat Nr, M.M  
Jabatan : Kepala BPS Kota Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM  
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 27 November 2020

Pihak Kedua

Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM  
NIP. 19650923 199003 2 002

Pihak Pertama

Ir. Taupiq Hidayat Nr, M.M  
NIP. 19680412 199402 1 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

## BPS KOTA PALEMBANG

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatkan Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	58,28
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	3,85
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistic	Persen	33,33
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	10
3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	2,5
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	69
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	80

## Program

## Anggaran

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. 5.649.132.000,- |
| 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik            | Rp. 4.519.983.000,- |

Palembang, 27 November 2020

Kepala BPS Kota Palembang

Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan  
Pihak Kedua

Ir. Endang Triwahyuningsih, M.M  
NIP. 19650923 199003 2 002

Ir. Taupiq Hidayat Nr, M.M  
NIP. 19680412 199402 1 001

## Lampiran 1. Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kota Palembang 2020

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	PK				Capaian Kinerja											
		Target		Realisasi		Kumulatif		Terhadap target setahun									
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
<b>PK dan IKU</b>																	
<b>T1 Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>																	
1.1. Meningkatkan Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persen	0	0	0	58,28	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	120
	Persen	0	0	0	3,85	0	0	0	0	3,85	0	0	0	0	0	0	100
<b>T2 Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>																	
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	0	0	0	33,33	0	0	0	0	33,33	0	0	0	0	0	0	100
	Persen	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	100
<b>T3 Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>																	
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persen	0	0	0	2,5	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	100
	Persen	0	0	0													
<b>T4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>																	
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Point	0	0	0	69	0	0	0	0	69,69	0	0	0	0	0	0	101
	Persen	0	0	0	80	0	0	0	0	81,67	0	0	0	0	0	0	102,09

## Lampiran 4

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KOTA PALEMBANG  
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2020**

No	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BPS Kota Palembang	-	15	19	1	7	-	-	42

Lampiran 1. Kegiatan BPS Kota Palembang 2020

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL DAN KHUSUS												
2	PENINGKATAN KUALITAS DAN LAYANAN PUBLIKASI												
3	PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NERACA SISI USES/ TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT /IO												
4	PENYUSUNAN NERACA RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NERACA												
5	PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA												
6	PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN PEMERINTAH TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES												
7	PENYUSUNAN KOMPONEN PMTB DAN INVENTORI TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT /IO SISI USES												
8	PENYUSUNAN KONSOLIDASI PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN												
9	PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010=100												
10	PEMUTAKHIRAN SISTEM DAN PROGRAM MFD DAN MBS BERBASIS WEB												
11	SURVEI WAKTU TUNGGU (DWELLING TIME) DI PELABUHAN												
12	KOMPILASI DATA TRANSPORTASI												
13	SURVEI PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH												
14	PENYUSUNAN DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN												
15	SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR												
16	SURVEI HARGA KONSUMEN DAN SURVEI VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS												
17	INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI												
18	SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN												
19	SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN												
20	SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TAHUNAN												
21	SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TRIWULANAN												
22	SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI												
23	SURVEI KONSTRUKSI												
24	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN												
25	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN												
26	PENDATAAN SHORT FORM SP2020												
27	SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI												
28	PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK KEAMANAN												
29	SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI												
30	PENDATAAN PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2020												
31	SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL												
32	SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA												
33	SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH												
34	SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH												
35	SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP												
36	SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN												

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
37	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN												
38	SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN												
39	SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN												
40	PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA												

## Lampiran 7

## RESPON RATE SURVEI BPS KOTA PALEMBANG 2020

No	Nama Survei	Target Sampel	Realisasi	Response Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	221	221	100
2	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan	806	806	100
3	Sensus Penduduk 2020	4195	4196	100
4	Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Dan Konsumsi	1.019	1.024	100,49
5	Penyusunan Statistik Politik Keamanan	1	1	100
6	Survei Perilaku Anti Korupsi	71	72	101,41
7	Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Tahun 2019	107	107	100
8	Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	132	132	100
9	Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan	212	206	97,17
10	IMK Tahunan	179	179	100
11	IMK Triwulanan	280	280	100
12	Survei Pertambangan dan Energi	11	9	81,81
13	Listrik	2	2	100
14	PDAM	3	3	3
15	Captive Power	109	109	100
16	updating Direktoring pertambangan 9	9	9	100
17	Survei Kontruksi Triwulanan	148	134	90,54
18	Survei Konstruksi Tahunan	220	220	100
19	Survei Konstruksi Perorangan	50	50	100
20	Survei Pencacahan RPH	4	4	100
21	Pencacahan PPI	4	3	75
22	Survei Perusahaan Kehutanan Tahunan	15	13	86,67
23	Tanaman Pangan Ubinan	144	110	76,39
24	KSA Padi	492	492	100
25	Survei Holtikultura dan Indikator Pertanian	918	918	100
26	Survei Perusahaan Perkebunan Triwulanan	6	4	66,67
27	Survei Perusahaan Perkebunan Tahunan	2	0	0
28	Survei Waktu Tunggu Dwelling Time di Pelabuhan	43	33	76,74
29	Survei AJR-II.2	1	1	100
30	Survei AJR-II.3	1	1	100
31	Survei PJ-2.5	1	1	100
32	Survei Simoppel	12	12	100
33	Survei Angkutan Udara (Bandara)	12	12	100
34	Survei Angkutan Penumpang Dan Barang Di Terminal Dan Jembatan Timbang	8	8	100

No	Nama Survei	Target Sampel	Realisasi	Response Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Survei Perdagangan Antar Wilayah	332	332	100
36	Penyusunan Direktori Pasar Dan Pusat Perdagangan	3	3	100
37	Survei Harga Perdagangan Besar	1392	1392	100
38	SHK (HK-4/5)	1080	1080	100
39	HK-1.1	1284	1284	100
40	HK-1.2	936	936	100
41	HK-2.1	1476	1476	100
42	HK-2.2	1248	1248	100
43	HK-3	3000	3000	100
44	HK-6	312	312	100
45	SVEB	105	120	114,28
46	Indeks Kemahalan Konstruksi	128	128	100
47	Survei Statistik Badan Usaha Dan Pasar Modal	6	6	100
48	VHT-S	1035	998	96,42
49	VHT-L	163	163	100
50	VREST-UMB	110	110	100
51	VREST-UMK	24	24	100
52	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	2	2	100
53	SKKRT	120	120	100
54	SKLNPR	10	10	100
55	Updating Direktori	40	40	100
56	LRA	4	4	100
57	SKSPPI	30	30	100
58	PMTB	6	6	100
59	SMAK	25	25	100
60	PDRB Pengeluaran	26	26	100
61	Survei Pengumpulan PDRB Lapangan Usaha	43	43	100

## Lampiran 7

## Judul Publikasi ARC BPS Kota Palembang

No	Judul Publikasi	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Keterangan
(1)	(2)			
1	PDRB menurut Pengeluaran Kota Palembang Tahun 2015-2019	29/5/2020	29/5/2020	Tepat Waktu
2	PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2015–2019	30/4/2020	30/4/2020	Tepat Waktu
3	Daerah Dalam Angka Kota Palembang	20/5/2020	20/5/2020	Tepat Waktu
4	Kecamatan Kemuning Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
5	Kecamatan Sako Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
6	Kecamatan Sematang Borang Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
7	Kecamatan Ilir Timur I Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
8	Kecamatan Ilir Timur II Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
9	Kecamatan Ilir Barat I Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
10	Kecamatan Ilir Barat II Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
11	Kecamatan Seberang Ulu II Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
12	Kecamatan Seberang Ulu I Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
13	Kecamatan Kertapati Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
14	Kecamatan Sukarami Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
15	Kecamatan Kalidoni Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
16	Kecamatan Plaju Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
17	Kecamatan Bukit Kecil Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
18	Kecamatan Alang-alang Lebar Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
19	Kecamatan Gandus Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
20	Kecamatan Jaka Baring Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
21	Kecamatan Ilir Timur III Dalam Angka Tahun 2020	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
22	Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020	30/12/2020	30/12/2020	Tepat Waktu
23	Kota Palembang Dalam Angka, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan	05/3/2020	05/3/2020	Tepat Waktu

**Judul Publikasi Non ARC BPS Kota Palembang**

No	Judul Publikasi	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Keterangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>			
1	Statistik Daerah Kota Palembang	28/9/2020	28/9/2020	Tepat Waktu
2	Indikator Kesejahteraan Kota Palembang Tahun 2020	28/12/2020	28/12/2020	Tepat Waktu
3	Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2019	28/12/2020	28/12/2020	Tepat Waktu

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PALEMBANG**

Jl. P.A.K Abdur Rohim No. 2 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil

Telp/Fax: (0711) 352184

Homepage: <http://palembangkota.bps.go.id>, Email: [bps1671@bps.go.id](mailto:bps1671@bps.go.id)